

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud disusunnya laporan keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode tertentu, yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebagai Entitas Pelaporan. Pemerintah Kota Ternate sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan guna dapat membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas, transparansi dan untuk membuat keputusan baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Daerah Kota Ternate.

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan diubah untuk kali kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 maka penyusunan Laporan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
3. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
CALK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan realisasi pencapaian target pendapatan, penjelasan pos belanja dan pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Arus Kas dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
22. Peraturan Walikota Ternate Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate Tahun 2011 – 2015.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangkapengungkapan yang memadai. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2012 dibagi kedalam enam bab, terdiri dari:

- BAB I** : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II** : Diuraikan mengenai kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD
- BAB III** : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV** : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis

pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan komponen-komponen laporan arus kas, disamping itu memuat pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.
- BAB VI : Berisi Penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan secara garis besar dari Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2012 telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi makro Kota Ternate Tahun 2012. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pada beberapa indikator ekonomi makro Kota Ternate yang akan dijabarkan dibawah ini.

Tabel 1.1

Kinerja Ekonomi Makro Kota Ternate
Tahun 2012

No	Indikator Ekomi	Tahun 2012	Tahun 2011
1.	Pertumbuhan Ekonomi	8.21 %	8.07%
2.	Inflasi	3.29%	4.52%
3.	Pendapatan Perkapita	Rp2.985.750	Rp2.928.618
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.26%	8.66%
5.	PDRB Harga Berlaku	Rp1.16 Trilyun	Rp1.14 Trilyun

Capaian ini menjelaskan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota ternate melalui APBD tahun anggaran 2012, telah mampu mendorong peningkatan pada beberapa indikator ekonomi makro di 9 sektor PDRB Kota ternate.

Sampai akhir Tahun 2012 perekonomian Kota ternate tumbuh sebesar 8,21%, lebih tinggi dibanding Tahun 2011 yaitu sebesar 8,01%. Pertumbuhan seluruh sektor-sektor ekonomi Kota Ternate menunjukkan hasil yang positif. Dengan kata lain bahwa secara sektoral pertumbuhan ekonomi Kota ternate tahun 2012 cukup baik. Demikian pula jika dilihat secara *propotional shift*-nya, dengan membandingkan tahun periode sebelumnya, maka seluruh sektor-sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif, itu artinya secara sektoral pertumbuhan ekonomi Kota ternate tergolong pada tingkat pertumbuhan yang cepat.

Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Ternate maka nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 diprediksi sebesar 1.16 trilyun rupiah atau lebih tinggi dibanding tahun 2011 yaoitu tercatat sebesar `1.14 trilyun rupiah. Dengan adanya peningkatan tersebut mengindikasikan telah terjadi peningkatan produktivitas pada sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, tercatat telah terjadi peningkatan pendapatan perkapita Kota Ternate di tahun 2012 sebesar Rp2.985.750, jika dibandingkan di tahun 2011 sebesar Rp2.928.618.

Semakin membaiknya pendapatan perkapita masyarakat di tahun 2012 secara langsung mempengaruhi permintaan masyarakat akan barang dan jasa di Kota Ternate, pemintaan tersebut tidak sampai berdampak pada masalah inflasi. Infalsi di Kota Ternate tahun 2012 mampu dikendalikan pada kisaran 3,29% jikda dibandingkan

dengan tahun 2011 tingkat inflasi mencapai 4,52%. Tingkat inflasi tahun 2012 masih lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 4,30%.

Perkembangan ekonomi yang membaik pada tahun 2012 memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian secara menyeluruh, hal ini memberi pengaruh positif pada tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kota Ternate tahun 2012 yang tercatat sebesar 7,26% (hasil sakernas Agustus 2012), angka ini mengalami penurunan/lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar 8,66%, yang secara konseptual mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan manusia (IPM), dimana pada tahun 2011 nilai IPM Kota Ternate meningkat menjadi 77,05% dan masih merupakan peringkat pertama di Propinsi Maluku Utara.

2.2 Kebijakan Keuangan.

Dengan mengacu pada kebijakan umum dan prioritas plafon Anggaran APBD tahun 2012, maka kebijakan umum keuangan daerah diarahkan pada komponen belanja langsung, dengan sasaran utama pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur serta peningkatan Sektor Potensial Bidang Perikanan, jasa dan perdagangan, usaha kecil dan menengah dalam rangka Penguatan potensi ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Untuk Tahun 2012 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Mencakup 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

No.Urut	Kode SKPD	Nama SKPD
1.	10101	Dinas Pendidikan Nasional
2.	10103	Sanggar Kegiatan Belajar
3.	10201	Dinas Kesehatan
4.	10301	Dinas Pekerjaan Umum
5.	10404	Kantor Pemadam Kebakaran
6.	10502	Dinas Tata Kota dan Pertamanan
7.	10601	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.	10701	Dinas Perhubungan
9.	10804	Dinas Kebersihan
10.	10805	Badan Lingkungan Hidup
11.	11001	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12.	11102	Kantor Pemberdayaan Perempuan
13.	11202	Badan Pengendalian Kependudukan dan KB
14.	11402	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
15.	11501	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16.	11703	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17.	11801	Dinas Pemuda dan Olahraga
18.	11903	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
19.	11904	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
20.	12001	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
21.	12002	Walikota dan Wakil Walikota

No.Urut	Kode SKPD	Nama SKPD
22.	12003	Sekretariat Daerah
23.	12004	Sekretariat DPRD
24.	12005	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
25.	12007	Inspektorat
26.	12011	Kecamatan Kota Ternate Utara
27.	12012	Kecamatan Kota Ternate Selatan
28.	12013	Kecamatan Pulau Ternate
29.	12014	Kecamatan Moti
30.	12015	Kecamatan Kota Ternate Tengah
31.	12016	Kecamatan Pulau Badan Dua
32.	12017	Kecamatan Hiri
33.	12018	Badan Penggulangan Bencana Daerah.
34.	12019	Dinas Pendapatan
35.	12102	Badan Kepegawaian Daerah
36.	12202	Badan Pemberdayaan Masyarakat
37.	12402	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.
38.	20105	Dinas Pertanian dan Kehutanan
39.	20106	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BP4K)
40.	20501	Dinas Kelautan dan Perikanan
41.	20602	Dinas Pasar
42.	20702	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sejalan dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan tersebut maka pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Ternate dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalamnya memuat tentang hak dan kewajiban daerah yang dibayarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan serta disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah, yang mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilisasi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan

Strategi kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Ternate pada tahun 2012 diarahkan pada langkah-langkah antara lain : (1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat; (2) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam secara lebih adil; (3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan

kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai aset daerah; (4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.

Pengelolaan pendapatan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dengan ketentuan ini maka struktur Pendapatan Daerah Kota Ternate terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pendapatan Pajak Daerah
 - b. Pendapatan Retribusi Daerah
 - c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-Lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
 - 1) Dana Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan
 - 2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
 - 3) Dana Alokasi Umum, dan
 - 4) Dana Alokasi Khusus
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari:
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Dana Penyesuaian
 - c. Pendapatan Lainnya

Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah yang dituangkan dalam RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015, maka kebijakan pendapatan daerah Kota Ternate diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
 - a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;

- d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
 - e. Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah melalui razia di lapangan secara terus-menerus dan menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kota Ternate.
 - f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan gedung/asrama/aula yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari gedung/asrama/aula tersebut;
 - g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba PD. Citra Gamalama dan PDAM;
 - h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
2. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
 - a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
 3. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
 4. Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pendapatan daerah Kota Ternate diharapkan dapat meningkat sesuai dengan target yang ingin dicapai.

2.2.2. Kebijakan Belanja

Kebijakan Umum Keuangan Daerah dalam perencanaan program dan kegiatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan ketentuan tersebut maka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola dengan tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Adapun kebijakan Belanja Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan.
2. Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas.
3. Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas.
4. Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proporsional dan Pro Rakyat
5. Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keresasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis.
6. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Bersih dan Berwibawa, serta Birokrasi yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan Responsif.
7. Peningkatan Ekonomi Rakyat, melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja.
8. Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah.
9. Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan.
10. Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat.
11. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan penjualan investasi permanen lainnya.

Kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Ternate tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja.
- b. Mengembangkan skema pengelolaan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program dan kegiatan strategis lainnya.

2. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Ternate tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong percepatan pengembangan ekonomi daerah melalui pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
- b. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran.
- c. Mendukung penyertaan modal dan pemberian pinjaman pada saat terjadi surplus anggaran dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1. Capaian Target Kinerja Pendapatan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dapat disampaikan secara garis besar sebagai berikut. Pendapatan Daerah realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp574.486.330.945,00 dari target setelah perubahan sebesar Rp585.401.542.000,00 atau 98,14 %, dengan demikian realisasi Pendapatan Daerah kurang dari target sebesar 1,86 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp527.081.539.018,00 atau 98,04% maka kinerja Pendapatan Daerah tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 8,99%.

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasinya mencapai 85.62%, dari realisasi ini tidak mencapai target PAD sebesar 14,38%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun Anggaran 2011, tercatat realisasi PAD Tahun Anggaran 2012 naik sebesar 5,07%. Di sisi lain yaitu Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Perimbangan dan dana transfer lainnya realisasi pencapaian targetnya tercatat sebesar 99,14%, apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2011 sebesar 97,93% tercatat realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2012 naik sebesar 9,12%. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 realisasinya mencapai 79.98%. Apabila dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2011 sebesar 162,68% kalau dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 tercatat realisasi anggaran Tahun Anggaran 2012 naik sebesar 37,10%.

2.3.2. Capaian Target Kinerja Belanja Daerah

Target pencapaian Belanja Daerah sebesar Rp608.056.749.745,00 sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 realisasinya sebesar Rp583.598.274.723,00 atau 95.89%, sehingga sisa anggaran belanja di tahun 2012 yang tidak dapat diserap sebesar Rp24.458.475.022,00 atau 4.02%. Apabila dibandingkan dengan kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang dianggarkan sebesar Rp564.136.838.942,00 realisasinya tercatat sebesar Rp531.953.442.503,00 atau 94,30%, maka kinerja Belanja Daerah di tahun 2012 mengalami kenaikan persentase sebesar 9,71%.

2.3.3. Capaian Target Kinerja Pembiayaan

Target pencapaian Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp0 sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 realisasinya sebesar Rp4.912.266.008,00, Apabila dibandingkan dengan kinerja Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011 yang dianggarkan sebesar Rp28.624.807.142,00 realisasinya tercatat sebesar Rp6.827.669.059,00 atau 23,97%, sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan di targetkan pada tahun 2012 sebesar Rp.5.250.000.000, realisasinya sebesar Rp.10.217.000.000 atau 195 %

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 telah mencapai hasil yang cukup memuaskan Hal ini dapat tergambar pada Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 yang ditargetkan sebesar Rp585.401.542.000,00 tercapai realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 tercatat sebesar Rp574.486.330.945,00 atau 98,14% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp527.081.539.018,00 Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp47.404.761.927,00 atau 8,99 %. Penjabaran realisasi pendapatan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Target pendapatan asli daerah pada tahun 2012 sebesar Rp38.435.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp32.907.344.834,00 atau 85,62%. dengan rincian sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Target pajak daerah pada tahun 2012 sebesar Rp19.060.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp17.989.070.701,00 atau 94,38%

2. Retribusi Daerah

Target retribusi daerah pada tahun 2012 sebesar Rp12.275.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp10.066.416.034,00 atau 82,01%

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2012 sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp292.560.386,00 atau 58,51%

4. Lain-lain PAD Yang Sah

Target Lain-lain PAD Yang Sah pada tahun 2012 sebesar Rp6.600.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp4.559.297.713,00 atau 69,08%

b. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada tahun 2012 sebesar Rp543.434.142.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp538.753.914.271,00 atau 99,14% dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak

Target Bagi Hasil Pajak pada tahun 2012 sebesar Rp39.000.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp30.660.387.231,00 atau 78,62%

2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam/ Bukan Pajak

Target Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada tahun 2012 sebesar Rp8.377.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp12.462.757.732,00 atau 148,77%

3. Dana Alokasi Umum

Target Dana Alokasi Umum pada tahun 2012 sebesar Rp404.588.285.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp404.588.285.000,00 atau 100,00%

4. Dana Alokasi Khusus

Target Dana Alokasi Khusus pada tahun 2012 sebesar Rp43.365.800.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp43.365.800.000,00 atau 100,00%.

5. Bagi Hasil Propinsi

Target bagi hasil dari Propinsi tahun 2012 sebesar Rp11.017.366.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun Rp10.479.032.628,00 atau 95,11 %.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2012 sebesar Rp3.532.400.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp2.825.071.840,00 atau 79,98 %. dengan rincian sebagai berikut:

1. Hibah

Target Hibah pada tahun 2012 sebesar Rp3.532.400.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp2.758.840.000,00 atau 78,10 %

2. Dana Penyesuaian

Target Dana Penyesuaian pada tahun 2012 sebesar Rp37.085.691.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp37.197.651.680,00 atau 100,30%

3. Penerimaan Lainnya

Dengan realisasi sebesar Rp66.231.840,00 yang berasal dari penerimaan dari PT. Taspen.

Permasalahan dan solusi

Adapun permasalahan dan solusi di bidang pendapatan daerah dalam tahun 2012, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dan kewajibannya terhadap daerah.
2. Kurangnya koordinasi dinas-dinas pengelola pendapatan asli daerah.
3. Kurangnya kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

b. Solusi

1. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dengan melakukan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat secara intens.
2. Menegakkan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang sengaja melalaikan kewajibannya.
3. Melakukan koordinasi secara rutin bagi dinas-dinas pengelola pendapatan daerah.
4. Meningkatkan kualitas petugas (SDM) dengan mengikutsertakan pada kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar, dan lain sebagainya yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah.

3.1.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp590.668.059.300,00. Setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target Belanja Daerah naik sebesar Rp17.388.690.445,00 atau 2,94% menjadi sebesar Rp608.056.749.745,00. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp583.598.274.723,00 atau 95,98%. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp24.458.505.022,00 atau 4,02%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat Rp531.953.442.503,00, terlihat realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 naik sebesar Rp51.644.802.220,00 atau 9,72%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Rincian belanja daerah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Target Belanja Pegawai pada tahun 2012 sebesar Rp355.245.702.184,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp354.473.627.626,00 atau 99,78%.

b. Belanja Barang dan Jasa

Target Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2012 sebesar Rp112.258.835.219,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp97.411.946.396,00 atau 86,77%.

c. Belanja Bunga

Target Belanja Bungatahun 2012 sebesar Rp38.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp37.421.241,00

d. Belanja Hibah

Target Belanja Hibah pada tahun 2012 sebesar Rp3.850.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp3.007.460.000,00 atau 78,12%.

e. Belanja Bantuan Sosial

Target Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2012 sebesar Rp9.350.756.900,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp9.000.193.450,00 atau 96,25%.

f. Belanja Bantuan Keuangan

Target Belanja bantuan Keuangan pada tahun 2012 sebesar Rp 538.500.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun sebesar Rp 520.739.120,00 atau 96,70%.

g. Belanja Modal

Target Belanja Modal pada tahun 2012 sebesar Rp117.502.555.442,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp110.419.957.140,00 atau 93,97%.

h. Belanja Tidak Terduga

Target Belanja Tidak Terduga pada tahun 2012 sebesar Rp9.272.400.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp8.726.929.750,00 atau 94,12%.

Permasalahan dan solusi

Adapun permasalahan dan solusi di bidang belanja daerah dalam tahun 2012, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Permasalahan

1. Kebijakan regulasi yang begitu cepat berubah menyebabkan masih adanya sebagian komponen belanja yang belum dapat disesuaikan dengan pedoman yang baru.

2. Penyusunan laporan-laporan SKPD terkait belanja masih banyak yang tidak tepat waktu.
- b. Solusi
1. Perlu adanya sosialisasi untuk kebijakan regulasi pengelolaan belanja sesuai pedoman yang baru.
 2. Memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak terlambat menyampaikan laporan terkait belanja.

3.1.3. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sebesar Rp4.912.266.008,00 bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2011 bersaldo negatif sebesar Rp(554.733.992,00) dan adanya penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp5.467.000.000,00. Penggunaan silpa sebesar Rp(554.733.992,00) dikarenakan pada tahun 2011 terjadi Sikpa sebesar Rp(141.234.425,00) dan reklas kas bendahara pengeluaran menjadi aset lainnya sebesar Rp(413.499.567,00). Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp10.217.000.000,00 yang terdiri dari penyertaan modal Bank Pembiayaan Rakyat, Bank Rakyat syariah dan PD Citra Gamalama kota serta Pembayaran pinjaman jangka pendek .

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2012 terdiri dari beberapa komponen yaitu:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Ternate. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah.

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai realisasi pada tanggal transaksi. Selanjutnya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.

Pemerintah Kota Ternate dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian dari 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang ada antara SKPD satu dengan SKPD lainnya yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate dan sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

1. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;

3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kota Ternate.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Transaksi dan kejadian diakui atas dasar *cash towards accrual* yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan, basis akuntansi yang digunakan adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.
2. Penyajian pos-pos neraca berupa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis.
3. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut.
5. Pengukuran laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.3.1 Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.1.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas dan Setara kas

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran. Setara kas terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 bulan dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan. Kas diukur dicatat sebesar nilai nominal.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek terdiri dari deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Investasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehan.

c. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai piutang yang belum dilunasi.

d. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan disajikan sebesar nilai perolehan.

4.3.1.2. Inventasi Jangka Panjang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu tahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

a. Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka

waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi terdiri dari bantuan modal dalam bentuk dana bergulir.

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen terdiri dari:

- 1) Penyertaan modal pemerintah daerah/ekuitas kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, dan badan usaha lainnya milik negara
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga.
- 3) Investasi permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

4.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan yang dikuasai. Aset terdiri dari:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, irigasi dan jaringan
- e. Aset tetap lainnya
- f. Konstruksi dalam pengerjaan

Batas pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap adalah yang harga perolehan per unitnya 1 juta rupiah. Batasan jumlah biaya untuk pemeliharaan, penambahan, penggantian dan perbaikan aset tetap sebesar 5% dari nilai harga perolehan, sebagai penambahan nilai aset tetap. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal.
- c. Biaya-biaya bersama non fisik dalam rangka memperoleh beberapa aset tetap yang harusnya menambah kapitalisasi masing-masing aset tetap belum diatur dalam kebijakan akuntansi sebagaimana teknik pendistribusiannya.

Namun Pemerintah Daerah Kota Ternate melakukan atribusi secara proporsional berdasarkan besaran jumlah belanja modal masing-masing kegiatan mengingat biaya-biaya tersebut memang seharusnya dikapitalisasi menambah aset-aset yang bersangkutan.

4.3.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana cadangan dan Lain-lain aset.

4.3.2 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Kewajiban jangka pendek meliputi Bagian Lancar Utang Luar Negeri, Bagian Lancar Hutang Luar kepada Pemerintah Pusat, Bagian Lancar Hutang kepada Pemerintah Daerah Otonomi Lainnya, Bagian Lancar Hutang kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Hutang kepada Bank/Lembaga Keuangan, Hutang Biaya Pinjaman (Denda, Biaya Administrasi dan Lain-Lain) dan Hutang atas Perhitungan Pihak Ketiga.

b. Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari:
 - a. Hutang Luar Negeri,
 - b. Hutang Kepada Pemerintah Pusat,
 - c. Hutang Kepada Pemerintah Daerah Otonomi Lainnya,
 - d. Hutang kepada BUMN/BUMD,
 - e. Hutang kepada Bank/Lembaga Keuangan
 - f. Hutang Dalam Negeri Lainnya, dan
 - g. Hutang Bunga

4.3.3 Akuntansi Ekuitas Dana

Mengatur perlakuan akuntansi sekuitas dana yang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran penilaian dan pengungkapan ekuitas dana. Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah.

4.3.4 Pengakuan Pendapatan dan Belanja

Seluruh pendapatan diakui pada saat diterima dan telah dibukukan pada Kas Daerah, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah dan telah diotorisasikan melalui pengesahan pihak yang berwenang.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate tahun anggaran 2012 mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Didalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media *adjustment* atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan *auditable* sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini (*auditable*).

Kebijakan Akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu aset tetap belum dilakukan penyusutan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya belum dilaksanakan dengan baik dan benar, karena terbentur masalah sumber daya/aparat yang masih belum memadai.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2012

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2012 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya. Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah, sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2012 dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp582.215.085.000,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut naik sebesar Rp3.186.457.000,00 atau 0,55 % menjadi Rp585.401.542.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp574.486.330.945,00 atau 98,14%, dengan demikian realisasi Pendapatan Daerah tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp10.915.211.055,00 atau 1,86%.

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp32.907.344.834,00, dan Pendapatan Transfer sebesar Rp538.753.914.271,00, sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah memiliki realisasi pendapatan sebesar Rp2.825.071.840,00.

Apabila realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 yang mencapai sebesar Rp574.486.330.945,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp527.081.539.018,00, realisasi Pendapatan Daerah di tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp47.404.791.927,00 atau Rp8,99%.

Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

No.	Jenis	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011 (Rp)
		Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
1	Pendapatan Asli Daerah	35.905.000.000,00	38.435.000.000,00	32.907.344.834,00	85,62	31.318.111.818,00
2	Dana Transfer	509.340.085.000,00	543.434.142.000,00	538.753.914.271,00	99,14	493.702.871.653,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	36.970.000.000,00	3.532.400.000,00	2.825.071.840,00	79,98	2.060.555.547,89
	Jumlah	510.933.877.800,00	585.401.542.000,00	574.486.330.945,00	98,14	527.081.539.018,89

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

PAD Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp35.905.000.000,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut naik Rp2.530.000.000,00 atau 7,05 % menjadi Rp38.435.000.000,00. Realisasi PAD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp32.907.344.834,00 atau 85,62%. Realisasi PAD tersebut dibawah target sebesar Rp5.527.655.166,00 atau 14,38%.

Apabila realisasi PAD tahun 2012 dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp31.318.111.818,00 pendapatan PAD di tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar Rp1.589.233.016,00 atau 5,07%.

Secara garis besar gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi PAD disampaikan berikut ini:

No.	Jenis	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011 (Rp)
		Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
1	Pajak Daerah	17.230.000.000,00	19.060.000.000,00	17.989.070.701,00	94,38	15.477.846.926,00
2	Retribusi Daerah	12.175.000.000,00	12.275.000.000,00	10.066.416.034,00	82,01	10.977.469.958,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	500.000.000,00	500.000.000,00	292.560.386,00	58,51	263.772.207,00
4	Lain-lain PAD	6.000.000,00	6.600.000,00	4.559.297.713,00	69,08	4.599.022.727,00
	Jumlah	35.905.000.000,00	38.435.000.000,00	32.907.344.834,00	85,62	31.318.111.818,00

1. Pajak Daerah

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 seperti tampak pada tabel tersebut di atas, tidak mencapai target anggaran yang ditetapkan setelah perubahan. Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp17.230.000.000,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut naik sebesar Rp1.830.000.000,00 atau 10,62% menjadi Rp19.060.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp17.989.070.701,00 atau 94,38%, dengan demikian realisasi Pajak Daerah ada kekurangan pencapaian sebesar Rp1.070.929.299,00 atau 5,62%. Apabila realisasi Pajak Daerah tahun 2012 dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp15.477.846.926,00 maka terlihat pendapatan pajak di tahun 2012 naik sebesar Rp2.511.233.775,00 atau 16,22%.

Lebih rinci mengenai realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012 digambarkan pada tabel berikut:

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011 (Rp)
		Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
1.	Pajak Hotel	900.000.000,00	1.300.000.000,00	1.463.166.702,00	112,55	1.091.690.619,00
2.	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	2.900.000.000,00	3.307.846.633,00	114,06	2.627.943.203,00
3.	Pajak Hiburan	100.000.000,00	115.000.000,00	165.194.652,00	143,65	78.112.450,00
4.	Pajak Reklame	830.000.000,00	845.000.000,00	1.032.577.230,00	122,20	782.992.550,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	7.500.000.000,00	8.000.000.000,00	8.312.451.028,00	103,91	7.332.307.359,00
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.418.010.000,00	56,72	2.125.958.000,00
7.	Pajak Parkir	150.000.000,00	150.000.000,00	74.153.400,00	49,44	42.267.540
8.	Pajak Air Bawah Tanah	550.000.000,00	550.000.000,00	167.820.863,00	30,51	107.395.280
9.	BPHTB	2.200.000.000,00	2.700.000.000,00	2.047.850.193,00	75,85	1.289.179.925
	Jumlah	17.230.000.000,00	19.060.000.000,00	17.989.070.701,00	94,38	15.477.846.926,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp900.000.000,00, setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp400.000.000,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.463.166.702,00 atau 112,55%, dengan demikian realisasi penerimaan pajak ini melampaui target sebesar Rp163.166.702,00 atau 12,55%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.091.690.619,00 terlihat realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2012 naik sebesar Rp371.476.083,00 atau 34,03%.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp2.500.000.000,00 setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut naik sebesar Rp400.000.000,00 atau 16% menjadi Rp2.900.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp3.307.846.633,00 atau 114,06%, dengan demikian, realisasi penerimaan pajak ini melampaui target sebesar Rp407.846.633,00 atau 14,06%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya mencapai Rp2.627.943.203,00 maka terlihat kontribusi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2012 naik sebesar Rp679.903.430,00 atau 25,87%.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp100.000.000,00, setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp15.000.000 atau 15%. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 mencapai Rp165.194.652,00 atau 143,65%, dengan demikian realisasi Pajak Hiburan tidak dapat melampaui target sebesar Rp50.194.652,00 atau 43,65%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp78.112.450,00 terlihat realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2012 naik sebesar Rp87.082.202,00 atau 111,48%.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp830.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.000.000 atau 1,81%. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.032.577.230,00 atau 122,20%, dengan demikian realisasi Pajak Reklame tidak dapat melampaui target sebesar Rp187.577.230,00 atau 22,20%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat Rp782.992.550,00, terlihat kontribusi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2012 naik sebesar Rp249.584.680,00 atau 31,88%.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp7.500.000.000,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut naik sebesar Rp500.000.000,00 atau 6,67% menjadi Rp8.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp8.312.451.028,00 atau 103,91%, dengan demikian realisasi penerimaan pajak ini dapat melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp312.451.028,00 atau 3,91%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp7.332.307.359,00 maka kontribusi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2012 terjadi peningkatan sebesar Rp980.143.669,00 atau 13,37%.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C

Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp2.500.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut tidak mengalami kenaikan anggaran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp1.418.010.000,00 atau 56,72%, dengan demikian realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C tidak mencapai target sebesar Rp1.081.990.000,00 atau 43,82%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat Rp2.125.958.000,00 terlihat kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Tahun Anggaran 2012 terjadi penurunan sebesar Rp707.948.000,00 atau 33,30%.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp150.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan anggaran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp74.153.400,00 atau 49,44%, dengan demikian realisasi Pajak Parkir tidak dapat mencapai target sebesar Rp75.846.600,00 atau 50,56%.

h. Pajak Air Bawah Tanah

Pajak Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp550.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan anggaran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp167.820.863,00 atau 30,51%, dengan demikian realisasi Pajak Air Bawah Tanah tidak dapat mencapai target sebesar Rp382.179.137,00 atau 69,49%.

i. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp2.200.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp500.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp2.047.850.193,00 atau 75,85%, dengan demikian realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak dapat mencapai target sebesar Rp652.149.807,00 atau 24,15 %.

2. Retribusi Daerah

Akun	Tahun 2012(Rp)	Tahun 2011(Rp)
Retribusi Daerah	10.066.416.034,00	10.977.469.958,00

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan Rp12.175.000.000,00 setelah perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut naik sebesar Rp100.000.000,00 atau sebesar 0,82% menjadi Rp12.275.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp10.066.416.034,00 atau 82,01%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak dapat melampaui target perubahan yang ditetapkan sebesar Rp2.208.583.966,00 atau 17,99%.

Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2012 dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yang jumlahnya tercatat Rp10.977.469.958,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah tahun 2012 menurun sebesar Rp911.053.924,00 atau 8,30%.

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2012			%
		Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)	Lebih / kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6(5:4)
I	Retribusi jasa umum	8,170,000,000.00	6,656,292,065.00	1,513,707,935.00	81.5%
II	Retribusi Jasa Usaha	2,000,000,000.00	1,375,428,320.00	624,571,680.00	68.8%
III	Retribusi Perizinan Tertentu	2,605,000,000.00	2,034,695,649.00	570,304,351.00	78.1%
	Jumlah	12,775,000,000.00	10,066,416,034.00	2,708,583,966.00	78.8%

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2012 di anggarkan sebesar Rp8.170.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp6.656.292.065,00 atau 81,5%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum tidak dapat melampaui dari target perubahan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.513.707.935,00 atau 18,5%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2012 seperti tergambar pada tabel.

No.	Jenis	Tahun 2012		%	Realisasi 2011 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)		
I. Retribusi Jasa Umum					
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan		208.406.400,00		
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan	1.750.000.000,00	1.656.908.500,00	94,68	1.616.370.500,00
3	Retribusi penggantian cetak KTP	490.000.000,00	220.030.000,00	44,90	415.470.000,00
4	Retribusi Parkir	1.300.000.000,00	1.033.800.000,00	79,52	1.236.950.000,00
5	Retribusi Pasar	3.600.000.000,00	2.831.662.165,00	78,66	3.300.479.648,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan	250.000.000,00	149.765.000,00	59,91	178.205.000,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam	750.000.000,00	555.720.000,00	74,10	544.130.000,00
8	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Bahan Pengadaan	30.000.000,00	-	0,00	0,00
9	Retribusi Pengukuran Kapal (Pas Kecil)	-	-	#DIV/0!	0,00
	Jumlah	8.170.000.000,00	6.656.292.065,00	81,47	7.291.605.148,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2012 antara lain sebagai berikut:

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Tahun 2012 terealisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp208.406.400,00. Realisasi ini terkumpul dari puskesmas dan labkesda di bawah Dinas Kesehatan Kota Ternate. Retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp208.406.400,00 ini adalah hanya merupakan jasa sarana,

sedangkan unsur yang lain digunakan langsung untuk kepentingan pelayanan dan jasa pelayanan adalah sebesar Rp703.772.100,00.

(2) Retribusi Pelayanan Kebersihan

Retribusi Pelayanan Kebersihan Pada Dinas Kebersihan Tahun Anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp1.750.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.656.908.500,00 atau 94,68%, dengan demikian terlihat realisasi retribusi ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp93.091.500,00 atau 5,32%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.616.370.500,00, terlihat retribusi ini di tahun 2012 naik sebesar Rp40.538.000,00 atau 2,51%.

(3) Retribusi Penggantian Cetak KTP

Retribusi Penggantian Cetak KTP Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2012, ditargetkan sebesar Rp490.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp220.030.000,00 atau 44,90%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak dapat melampaui target sebesar Rp269.970.000,00 atau 55,10%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Cetak KTP Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp415.470.000,00, penerimaan retribusi ini di tahun 2012 turun sebesar Rp195.205.000,00 atau 47,04%.

(4) Retribusi Parkir

Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2012, ditargetkan sebesar Rp1.300.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp1.033.800.000,00 atau 79,52%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak dapat melampaui target sebesar Rp266.200.000,00 atau 20,48%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Parkir Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp1.236.950.000,00, penerimaan retribusi ini di tahun 2012 turun sebesar Rp203.150.000,00 atau 16,42%.

(5) Retribusi Pasar

Retribusi Pasar Pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2012, ditargetkan sebesar Rp3.600.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp2.831.662.165,00 atau 78,66%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak dapat melampaui target sebesar Rp768.337.835,00 atau 21,34%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp3.300.479.648,00, penerimaan retribusi ini di tahun 2012 turun sebesar Rp468.817.483,00 atau 14,20%.

(6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp250.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp149.765.000,00 atau 59,91%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dapat mencapai target sebesar Rp100.235.000,00 atau 40,09%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp178.205.000,00, terlihat penerimaan retribusi ini di tahun 2012 turun sebesar Rp28.440.000,00 atau 15,95%.

(7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Pada Kantor Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp750.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp555.720.000,00 atau 74,10%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam tidak dapat mencapai target sebesar Rp194.280.000,00 atau 25,90%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp544.130.000,00, terlihat penerimaan retribusi ini di tahun 2012 naik sebesar Rp11.590.000,00 atau 2,13%.

b. Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi obyeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp1.500.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp1.375.428.320,00 atau 91,70%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat melampaui target sebesar Rp124.571.680,00 atau 8,30%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2012 disajikan lebih rinci pada tabel.

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2012		%	Realisasi 2011 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)		
1	2	4	5	6=(5/4)	7
II. Retribusi Jasa Usaha					
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	250.000.000,00	377.320.320,00	150,93	76.000.000,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	30.000.000,00	-	-	-
3	Retribusi Jasa Terminal	500.000.000,00	385.400.000,00	77,08	221.000.000,00
4	Retribusi Penyedotan Kakus	80.000.000,00	19.550.000,00	24,44	17.250.000,00
5	Retribusi Pemasukan Pengeluaran Hewan	-	-	-	48.710.000,00
6	Retribusi Potong Hewan	100.000.000,00	63.765.000,00	63,77	47.000.000,00
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	365.000.000,00	338.200.000,00	92,66	234.500.000,00
8	Retribusi Jasa Pelabuhan Laut	175.000.000,00	191.193.000,00	109,25	47.791.000,00
9	Retribusi Pemanfaatan Kayu Olahan	-	-	-	32.277.500,00
	Jumlah	1.500.000.000,00	1.375.428.320,00	91,70	724.528.500,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2012 antara lain sebagai berikut:

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

S K P D	Tahun 2012 (Rp)
Dinas Kebersihan	47.100.000,00
Sekretariat Daerah	4.500.000,00
Dinas Perikanan dan Kelautan	319.220.320,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	6.500.000,00
Jumlah	377.320.320,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2012, ditargetkan sebesar Rp250.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp377.320.320,00 atau 150,93 %, dengan demikian realisasi retribusi ini dapat melampaui target sebesar Rp127.320.320,00 atau 50,93 %.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp156.910.000,00, terlihat retribusi ini di tahun 2012 naik sebesar Rp220.410.320,00 atau 140,47%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja. Seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.

(2) Retribusi Jasa Terminal

Retribusi Jasa Terminal Pada Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2012, ditargetkan sebesar Rp500.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 mencapai Rp385.400.000,00 atau 77,08%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat melampaui target sebesar Rp114.600.000,00 atau sebesar 22,92%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp443.400.000,00, terlihat realisasi retribusi ini di tahun 2012 turun sebesar Rp58.000.000,00 atau 13,08%.

(3) Retribusi Penyedotan Kakus

Retribusi Penyedotan Kakus Pada Dinas Kebersihan Tahun Anggaran 2012, ditargetkan sebesar Rp80.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp19.550.000,00 atau 24,44%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp60.450.000,00 atau sebesar 75,56%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyedotan Kakus Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp21.550.000,00, terlihat realisasi retribusi ini di tahun 2012 turun sebesar Rp2.000.000,00 atau 9,28%.

(4) Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2012, ditargetkan sebesar Rp100.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp63.765.000,00 atau 63,77%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp36.235.000,00 atau sebesar 36,23%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp52.650.000,00, terlihat realisasi retribusi ini di tahun 2012 naik sebesar Rp11.115.000,00 atau 21,11%.

(5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Lokasi Parkir	Tahun 2012 (Rp)
Parkir Dalam Pelindo / Pelabuhan	16.000.000,00
Parkir Khusus Bandara	322.200.000,00
Jumlah	338.200.000,00

Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2012, ditargetkan sebesar Rp365.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp338.200.000,00 atau 92,66%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat melampaui target sebesar Rp26.800.000,00 atau sebesar 7,34%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp352.350,000,00, terlihat realisasi retribusi ini di tahun 2012 turun sebesar Rp14.150.000,00 atau 4,02 %.

(6) Retribusi Jasa Pelabuhan Laut

Retribusi Jasa Pelabuhan Laut Pada Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2012, ditargetkan sebesar Rp175.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp191.193.000,00 atau 109,25%, dengan demikian realisasi retribusi ini dapat melampaui target sebesar Rp16.193.000,00 atau sebesar 9,25%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Pelabuhan Laut Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp179.084.000,00, terlihat realisasi retribusi ini di tahun 2012 naik sebesar Rp12.109.000,00 atau 6,76%.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2012, ditargetkan sebesar Rp2.605.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp2.034.695.649,00 atau 78,11%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak melampaui target sebesar Rp570.304.351,00 atau 21,89%.

Lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2012 disajikan lebih rinci pada tabel berikut:

No	Jenis Pendapatan	Tahun anggaran 2012		%	Realisasi 2011 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
II. Retribusi Perizinan Tertentu					
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1,035,000,000.00	894,008,974.00	86.38	1,026,098,455.00
2	Retribusi Izin Gangguan	900,000,000.00	934,122,675.00	103.79	941,825,375.00
3	Retribusi Izin Trayek	85,000,000.00	22,165,000.00	26.08	24,480,000.00
4	Retribusi Izin Usaha Pariwisata	-	-	#DIV/0!	0.00
5	Retribusi Izin Rekreasi dan Hiburan Umum	255,000,000.00	171,009,000.00	67.06	205,731,000.00
6	Retribusi Izin Perikanan	300,000,000.00	13,390,000.00	4.46	281,785,980.00
7	Retribusi Tera/tera Ulang	30,000,000.00	-	0.00	-
	Jumlah	2,605,000,000.00	2,034,695,649.00	78.11	2,479,920,810.00

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2012 antara lain sebagai berikut:

(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Tahun Anggaran 2012, ditargetkan sebesar Rp1.035.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp894.008.974,00 atau 86,38%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target, terdapat kekurangan sebesar Rp140.991.026,00 atau 13,62 %.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp1.026.098.455,00 retribusi ini di tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp132.089.481,00 atau 12,87%.

(2) Retribusi Izin Gangguan

Retribusi Izin Gangguan Pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2012, ditargetkan sebesar Rp900.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp934.122.675,00 atau 103,79%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target sebesar Rp34.122.675,00 atau 3,79%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Gangguan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp941.825.375,00 retribusi ini di tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp7.702.700,00 atau 0,82%.

(3) Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2012, ditargetkan sebesar Rp85.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp22.165.000,00 atau 26,06 %, dengan demikian retribusi izin trayek tidak mencapai target sebesar Rp62.835.000,00 atau 73,94%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp24.480.000,00, terlihat mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar Rp2.315.000,00 atau 9,46%.

(4) Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2012, ditargetkan sebesar Rp255.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp171.009.000,00 atau 67,06%, dengan demikian tidak tercapai target sebesar Rp83.991.000,00 atau 32,94%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp205.731.000,00, terlihat mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar Rp34.722.000,00 atau 16,88%.

(5) Retribusi Izin Perikanan

Retribusi Izin Perikanan Pada Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2012, ditargetkan sebesar Rp330.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp13.390.000,00 atau 4,06%, dengan demikian tidak tercapai sebesar Rp316.610.000,00 atau 95,94%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Perikanan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp281.785.980,00, terlihat mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar Rp268.395.980,00 atau 95,25%.

(6) Retribusi Tera-tera Ulang

Retribusi Tera-tera Ulang tahun anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp30.000.000,00. Sampai dengan akhir tahun Anggaran 2012, belum ada realisasi yang tercapai. Untuk kedepannya pengelolaan retribusi ini di kelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Akun	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)
Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	292.560.386,00	263.772.207,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2012, ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp292.560.386,00 atau 58,51%, dengan demikian realisasi penerimaan tersebut Tidak dapat mencapai target sebesar Rp207.439.614,00 atau 41,49%.

Apabila realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2012 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp263.772.207,00 terlihat pendapatan di tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar Rp28.788.179,00 atau 10,91%. Pendapatan ini seluruhnya merupakan pembagian laba atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan daerah Maluku.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Lain-lain PAD Tahun Anggaran 2012, ditargetkan sebesar Rp6.600.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp4.559.297.713,00 atau 69,08%, dengan demikian realisasi penerimaan Lain-Lain PAD tidak dapat mencapai target sebesar Rp 2.040.702.287,00 atau 30,92%

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp4.599.022.727,00, terlihat pendapatan di tahun 2012 turun sebesar Rp 39.725.014,00 atau 0,86%.

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD Tahun Anggaran 2012, digambarkan pada tabel berikut:

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012		%	Realisasi 2011 (Rp)
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)		
1	2	4	5	6	7
1	Sumbangan Pihak Ketiga	3,300,000,000.00	1,642,042,029.00	49.76	2,564,295,581.00
2	Bunga Jasa Giro	400,000,000.00	222,325,617.00	55.58	260,182,902.00
3	Bunga Deposito	450,000,000.00	343,116,400.00	76.25	323,823,226.00
4	Penerimaan Lainnya	2,450,000,000.00	1,176,283,667.00	48.01	1,384,904,518.00
5	Donasi Bandara	1,300,000,000.00	1,175,530,000.00	90.43	
	Jumlah	7,900,000,000.00	4,559,297,713.00	57.71	4,599,022,727.00

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Tahun Anggaran 2012, antara lain sebagai berikut:

a. Sumbangan Pihak Ketiga

Sumbangan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp3.300.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 Rp1.642.042.029,00 atau 49,76%. Realisasi penerimaan ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp1.657.957.971,00 atau 50,24%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Sumbangan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp2.564.295.581,00, penerimaan di tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp 922.253.552,00 atau 35,97%.

b. Bunga Jasa Giro

Bunga Jasa Giro Tahun Anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp400.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp222.325.617,00 atau 55,58%, dengan demikian realisasi Bunga Jasa Giro tidak dapat mencapai target sebesar Rp177.674.383,00 atau 44,42%.

c. Bunga Deposito

Bunga Deposito Tahun Anggaran 2012, ditargetkan Rp450.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp343.116.400,00 atau 76,25%, dengan demikian realisasi Bunga Deposito Tidak dapat mencapai target sebesar Rp106.883.600,00 atau 23,75%. disebabkan oleh turunnya tingkat suku bunga Bank.

d. Penerimaan Lainnya

Penerimaan Lainnya terealisasi sebesar Rp1.176.283.667,00 atau 48,01% dari target sebesar Rp2.450.000.000,00. Dengan demikian realisasi penerimaan lainnya tidak dapat mencapai target sebesar Rp1.273.716.333,00 atau 51,99%.

e. Donasi Bandara

Donasi Bandara terealisasi sebesar Rp1.175.530.000 atau 90,43% dari target sebesar Rp1.300.000.000,00. Jadi Donasi Bandara selama tahun 2012 tidak dapat mencapai target sebesar Rp124.470.000,00 atau 9,57%.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan)

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp543.434.142.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp538.753.924.699,00 atau 99,14%, dengan demikian di tahun 2012 realisasi Pendapatan Transfer tidak mencapai target sebesar Rp4.680.217.301,00 atau 0,86%.

Apabila realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2012 dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp493.702.871.653,00 realisasi Pendapatan Transfer di tahun 2012 naik sebesar Rp45.051.053.046,00 atau 9,13%. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2012 disajikan pada tabel berikut:

No.	Uraian	Anggaran perubahan (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)	%	Realisasi 2011 (Rp)
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	495.331.085.000,00	491.077.229.963,00	99,14	394.183.708.114,00
1.1	Bagi Hasil Pajak	39.000.000.000,00	30.660.387.231,00	78,62	42.799.147.368,00
a	Pajak Bumi dan Bangunan	35.000.000.000,00	27.394.339.555,00	78,27	33.744.486.107,00
b	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	0,00
c	Pajak Penghasilan	4.000.000.000,00	3.266.017.676,00	81,65	9.054.661.261,00
1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8.377.000.000,00	12.462.757.732,00	148,77	8.001.804.746,00
a	PSDH	609.000.000,00	411.431.236,00	67,56	319.031.272,00
b	Royalti	7.605.000.000,00	11.707.340.277,00	153,94	7.421.725.232,00
c	Perikanan	163.000.000,00	343.986.219,00	211,03	261.048.242,00
1.3	Dana Alokasi Umum	404.588.285.000,00	404.588.285.000,00	100,00	313.861.356.000,00
1.4	Dana Alokasi Khusus	43.365.800.000,00	43.365.800.000,00	100,00	29.521.400.000,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	37.085.691.000,00	37.197.651.680,00	100,30	85.416.616.880,00
2.1	Dana Penyesuaian	37.085.691.000,00	37.197.651.680,00	100,30	85.416.616.880,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	11.017.366.000,00	10.479.032.628,00	95,11	14.102.546.659,00
3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	11.017.366.000,00	10.479.032.628,00	95,11	14.102.546.659,00
a	Bagi Hasil dari PKB	7.207.366.000,00	6.991.749.318,00	97,01	10.456.183.699,00
b	Bagi Hasil dari BBNKB	1.985.000.000,00	1.534.868.469,00	77,32	1.668.968.036,00
c	Bagi Hasil dari PBBKB	1.725.000.000,00	1.920.504.001,00	111,33	1.946.643.484,00
d	Bagi Hasil dari Pajak ABT	-	-	-	0,00
e	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	100.000.000,00	31.910.840,00	31,91	30.751.440,00

1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

a. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp39.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp30.660.387.231,00 atau 78,62%, dengan demikian tahun 2012 penerimaan Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target sebesar Rp8.339.612.769,00 atau 21,38%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2011 yang tercatat Rp42.799.147.368,00, penerimaan Bagi Hasil Pajak di Tahun 2012 turun sebesar Rp12.138.760.137,00 atau 28,36 %.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

(1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 2012 ditargetkan Rp35.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai sebesar Rp27.394.339.555,00 atau 78,27%, dengan demikian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tidak mencapai target sebesar Rp7.605.660.445,00 atau 21,73%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp33.744.486.107,00 penerimaan bagi hasil PBB di tahun 2012 turun sebesar Rp6.350.146.552,00 atau 18,82%.

(2) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh Tahun Anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp4.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.266.017.676,00 atau 81,65%, dengan demikian tahun 2012 tidak mencapai target sebesar Rp733.982.324,00 atau 18,35%.

Apabila realisasi penerimaan PPh tahun 2012 dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp9.054.661.261,00, realisasi PPh di tahun 2012 turun sebesar Rp5.788.643.585,00 atau 63,93%.

b. Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (SDA)

No	Uraian	Anggaran	Th 2012	Th 2011
B a g i 1	PSDH	609.000.000	411.431.236	319.031.272
2	Royakty	7.605.000.000	11.707.340.277	7.421.725.232
3	Perikanan	163.000.000	343.986.219	261.048.242
	Jumlah	8.377.000.000	12.462.757.732	8.001.804.746

Hasil Bukan Pajak/SDA Tahun Anggaran 2012 ditargetkan Rp8.377.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp12.462.757.732,00 atau 148,77%, dengan demikian realisasi penerimaan melebihi target sebesar Rp4.085.757.732,00 atau 48,77%.

Apabila total realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tahun 2012 sebesar Rp12.462.757.732,00 dibandingkan dengan total realisasi tahun 2011 yang tercatat Rp8.001.804.746,00, maka di tahun 2012 naik sebesar Rp4.460.952.986,00 atau 55,75%.

Realisasi Penerimaan Bagian Daerah atas Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tahun 2012 bersumber dari:

(1) PSDH sebesar Rp411.431.236,00

Bagi Hasil SDA dari PSDH Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp 609.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp411.431.236,00 atau 67,56%, dengan demikian penerimaan Bagi Hasil SDA dari PSDH tidak mencapai target sebesar Rp197.568.764,00 atau 32,44%.

(2) Royalti sebesar Rp11.707.340.277,00

Penerimaan Royalti Tahun Anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp7.605.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp11.707.340.277,00 atau 153,94%, dengan demikian penerimaan dari Royalti melebihi target sebesar Rp4.102.340.277,00 atau 53,94%.

(3) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp343.986.219,00

Bagi Hasil SDA dari Pungutan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp163.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp343.986.219,00 atau 211,03%, dengan demikian penerimaan Bagi Hasil SDA dari Pungutan Hasil Perikanan melampaui target sebesar Rp180.986.219,00 atau 111,03%.

c. Dana Alokasi Umum

Akun	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)
Dana Alokasi Umum	404.588.285.000,00	313.861.356.000,00

Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp404.588.285.000,00 dan realisasi sampai akhir tahun 2012 sebesar Rp404.588.285.000,00 atau 100 %.

d. Dana Alokasi Khusus

Akun	Th 2012(Rp)	Th 2011(Rp)
Dana Alokasi Khusus	43.365.800.000,00	29.521.400.000,00

Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp43.365.800.000,00 dan realisasi sampai akhir tahun 2012 sebesar Rp43.365.800.000,00 atau 100 %.

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Dana Penyesuaian

Akun	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)
Dana Penyesuaian	37.197.651.680,00	85.416.616.880,00

Dana ini adalah merupakan dana yg diperuntukkan bagi tunjangan sertifikasi tenaga guru.

Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp37.085.691.000,00 dan realisasi sampai akhir tahun 2012 sebesar Rp37.197.651.680,00 atau 100,30%. Realisasi tersebut melampaui target sebesar Rp111.960.680,00 atau 0,30%.

3. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi

Akun	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)
Bagi Hasil Pajak	10.479.032.628,00	14.102.546.659,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp11.017.366.000,00 dan realisasi sampai akhir tahun 2012 sebesar Rp10.479.032.628,00 atau 95,11%. Realisasi tersebut tidak mencapai target sebesar Rp538.333.372,00 atau 4,89%. Adapun rincian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

(1) Bagi Hasil dari PKB

Bagi Hasil dari PKB Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp7.207.366.000,00 dan realisasi sampai akhir tahun 2012 sebesar Rp6.085.469.766,00 atau 84,43%. Realisasi tersebut tidak mencapai target sebesar Rp1.121.896.234,00 atau 15,57%.

(2) Bagi Hasil dari BBNKB

Bagi Hasil dari BBNKB Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp1.985.000.000,00 dan realisasi sampai akhir tahun 2012 sebesar Rp1.534.868.469,00 atau 77,32%. Realisasi tersebut tidak mencapai target sebesar Rp450.131.531,00 atau 22,68%.

(3) Bagi Hasil dari PBBKB

Bagi Hasil dari PBBKB Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp2.725.000.000,00 dan realisasi sampai akhir tahun 2012 sebesar Rp2.826.783.553,00 atau 103,74%. Realisasi tersebut melampaui target sebesar Rp101.783.553,00 atau 3,74%.

(4) Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sampai akhir tahun 2012 sebesar Rp31.910.840,00 atau 31,91%. Realisasi tersebut tidak mencapai target sebesar Rp68.089.160,00 atau 68,09%.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2012 sampai dengan ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp3.532.400.000,00. Dan terealisasi sebesar Rp2.852.071.840,00 atau 80,74%, Lain-lain Pendapatan yang sah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2012	
		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)
1	2	4	5
I	Pendapatan Hibah	3,352,400,000.00	2,758,840,000.00
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah		2,758,840,000.00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri		
II	Penerimaan Lainnya		66,231,840.00
	Penerimaan Lainnya / TASPEN		66,231,840.00
	Jumlah	3,352,400,000.00	2,825,071,840.00

5.1.2 Belanja Daerah

Akun	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)
Belanja Daerah	583.598.274.723,00	531.953.502.503,00

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp608.056.749.745,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2012 sebesar Rp583.598.274.723,00 atau 95,98%, sehingga sisa anggaran di tahun 2012 yang tidak dapat diserap sebesar Rp24.458.475.022,00 atau 4,02%.

Selanjutnya apabila realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp531.953.502.503,00 terlihat peningkatan/kenaikan realisasi belanja di tahun 2012 sebesar Rp51.644.772.220,00 atau 9,71%.

Rincian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tergambar pada tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)	%	Realisasi 2011 (Rp)
1	2	3	4	5 (4:3)	6
	JENIS BELANJA				
I	Belanja Operasi	481,281,794,303.00	464,451,387,833.00	96.50	432,987,470,468.00
1	Belanja Pegawai	355,245,702,184.00	354,473,627,626.00	99.78	324,603,284,220.00
2	Belanja Barang	112,296,835,219.00	97,411,946,396.00	86.75	95,467,534,328.00
3	Belanja Hibah	3,850,000,000.00	3,007,460,000.00	78.12	5,051,843,750.00
4	Belanja Bantuan Sosial	9,889,256,900.00	9,558,353,811.00	96.65	7,864,808,170.00
II	Belanja Modal	117,502,555,442.00	110,419,957,140.00	93.97	94,165,997,035.00
1	Belanja Tanah	7,133,795,750.00	6,779,932,720.00	95.04	6,567,358,000.00
2	Belanja Peralatan dan mesin	20,195,073,676.00	19,350,415,582.00	95.82	15,223,790,809.00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	43,270,248,639.00	40,705,968,967.00	94.07	21,096,159,765.00
4	Jaringan	44,476,563,577.00	41,084,476,271.00	92.37	50,425,461,261.00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2,426,873,800.00	2,499,163,600.00	102.98	853,227,200.00
6	Belanja Aset Lainnya				
III	Belanja Tak Terduga	9,272,400,000.00	8,726,929,750.00	94.12	4,799,975,000.00
1	Belanja Tak Terduga	9,272,400,000.00	8,726,929,750.00	94.12	4,799,975,000.00
	Jumlah (I,II dan III)	608,056,749,745.00	583,598,274,723.00	95.98	531,953,442,503.00

Penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Daerah menurut Klasifikasi Ekonomi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah di klasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi ekonomi berdasarkan jenis belanja untuk Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial, serta Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) Tahun Anggaran 2012, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Perincian Belanja Operasi sbb :

Akun	Tahun 2012 (Rp)
Belanja Pegawai	354.473.627.626,00
Belanja Barang dan jasa	97.411.946.396,00
Belanja Bunga	37.421.241,00
Belanja Subsidi	-
Belanja Hibah	3.007.460.000,00
Belanja Bantuan Sosial	9.003.450.312,00
Belanja Bantuan Keuangan	520.739.120,00
Jumlah	464.451.387.833,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2012 diproyeksikan Rp481.281.794.303,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp464.451.747.000,00 atau 96,50%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp16.830.047.303 atau 3,50%.

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 diproyeksikan sebesar Rp355.245.702.184,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp354.473.627.626,00 atau 99,78%, dari realisasi tersebut, sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp772.074.558,00 atau 0,22%.

Rincian belanja pegawai tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai (Rp)
Belanja Pegawai Tidak Langsung	
- Belanja Gaji dan Tunjangan	295.514.650.899,00
- Belanja Tambahan Penghasilan	20.502.989.023,00
- Belanja Penerimaan Lain DPRD & Kpl Daerah	1.736.490.000
- Biaya Pungut Pajak Daerah	1.188.631.392
	-
Belanja Pegawai Langsung	-
- Honorarium PNS	12.436.303.447,00
- Honorarium Non PNS	21.314.329.740,00
- Uang Lembur	623.866.625,00

Deskripsi	Nilai (Rp)
- Kursus / Pelatihan/ diserahkan kpd masyarakat	927.366.500,00
- Pengobatan	229.000.000,00
TOTAL	354.473.627.626,00

Dari realisasi sebesar Rp354.473.627.626,00 digunakan untuk:

- 1) Biaya pemungutan PBB sebesar Rp1.188.631.392,00 diberikan sebagai tambahan penghasilan;

b. Belanja Barang

Belanja Barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Belanja Barang Tahun Anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp112.258.835.219,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai sebesar Rp97.411.946.396,00 atau 86,77%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp14.846.888.283,00 atau 13,23%.

Rincian belanja barang dan jasa tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	5.716048090,00
2	Belanja Bahan / Material	19.867.170.113,00
3	Belanja Jasa Kantor	10.968.815.493,00
4	Belanja Premi Asuransi	999.905.500,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.521.099.880,00
6	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.567.069.975,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung	1.544.662.110,00
8	Belanja Sewa Mobilitas	347.504.600,00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	514.325.000,00
10	Belanja Makan dan Minum	8.245.682.676,00
11	Belanja Pakaian Dinas	989.834.900,00
12	Belanja Pakaian Kerja	392.535.500,00
13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari Hari Tertentu	374.003.500,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	26.697.985.024,00
15	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.430.300.000,00
16	Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi	1.193.476.000,00
17	Belanja Pemeliharaan	2.224.078.405,00
18	Belanja Jasa Konsultasi	3.281.527.500,00
19	Belanja Barang yg diserahkan ke masyarakat	2.596.092.130,00
	Jumlah	97.411.946.396,00

c. Belanja Bunga

Akun	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)
Belanja Bunga	37.421.241,00	-

Belanja bunga merupakan beban bunga pinjaman jangka pendek pada tahun anggaran 2012. Dimana belanja bunga dianggarkan pada anggaran perubahan sebesar Rp38.000.000,00. Pada tahun anggaran 2011 tidak terdapat belanja bunga karena pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kota Ternate tidak mempunyai Pinjaman daerah.

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk pemberian hibah dalam bantuan uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya atau kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah Tahun Anggaran 2012 semula diproyeksikan sebesar Rp3.850.000.000,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.007.460.000,00 atau 78,12%, terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp842.540.000,00 atau 21,88%.

Realisasi belanja hibah tahun 2012 terdiri dari:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Komisi Penanggulangan AIDS	47.460.000,00
2	PKK kota Ternate	500.000.000,00
3	Dharma Wanita Kota Ternate	300.000.000,00
4	Pramuka	560.000.000,00
5	Korpri	450.000.000,00
6	Koni Kota Ternate	450.000.000,00
7	PMI	250.000.000,00
8	Badan amil Zakat	150.000.000,0
9	KNPI	300.000.000,00
	Jumlah	3.007.460.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja ini digunakan untuk pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 diproyeksikan sebesar Rp9.350.756.900,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp9.000.193.450,00 atau 96,25%, sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp350.563.450,00 atau 3,75%. Bantuan Sosial ini diberikan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Keagamaan, Partai Politik dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2012 terdiri dari:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Sosial Kemasyarakatan	8.378.693.450,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	631.500.000,00
	Jumlah	9.000.193.450,00

f. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan Keuangan adalah Belanja bantuan yang diperuntukan untuk kegiatan Partai Politik. Belanja bantuan keuangan pada Tahun 2012 diproyeksikan sebesar Rp538.500.000,00. Realisasi pada akhir tahun Anggaran 2012 sebesar Rp520.739.120,00 atau 96,70% .sedangkan anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp17.760.880,00 atau 3,30 %.

2. Belanja Modal

Perincian Belanja Modal sbb :

Akun	Tahun 2012 (Rp)
Belanja Tanah	6.779.932.720,00
Belanja Peralatan dan Mesin	19.350.415.582,00
Belanja Gedung dan Bangunan	40.705.968.967,00
Belanja Jalan , Irigasi dan Jaringan	41.084.476.271,00
Belanja Aset Tetap lainnya	2.499.163.600,00
Jumlah	110.419.957.140,00

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp117.502.555.442,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp110.419.657.140,00 atau 93,97%, dengan demikian tahun 2012, sisa anggaran Belanja Modal yang tidak dapat diserap sebesar Rp7.082.898.302,00 atau 6,03%.

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Tanah

Belanja Tanah Tahun Anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp7.133.795.750,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp6.779.932.720,00 atau 95,04% dan sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp353.863.030,00 atau 4,96%. Belanja sebesar Rp6.779.932.720,00 merupakan belanja tanah kantor.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2012 di targetkan sebesar Rp20.195.073.676,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp19.350.415.582,00 atau 95,82% dan sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp 844.658.094,00 atau 4,18 %.

Rincian belanja peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal Alat Berat	1.440.550.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkut Darat Bermotor	5.249.930.725,00
3	Belanja Modal Alat angkut Darat tidak Bermotor	-
4	Belanja Modal Alat Angkut Air Bermotor	575.500.000,00
5	Belanja Modal Alat Angkut Air Tidak Bermotor	-
6	Belanja Modal Alat angkut Udara	-
7	Belanja Modal Alat Bengkel	518.461.500,00
8	Belanja Modal Alat Pengolahan Pertanian	19.000.000,00
9	Belanja Modal Peralatan Kantor	408.0870100,00
10	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	518.318.450,00
11	Belanja Modal Komputer	1.574.886.987,00
12	Belanja Modal Mebulair	1.915.064.930,00
13	Belanja Modal Alat Dapur	65.253.950,00
14	Belanja Modal Penghias rumah tangga	382.792.000,00
15	Belanja Modal alat studio	229.674.000,00
16	Belanja Modal Alat Komunikasi	124.435.000,00
17	Belanja Modal Alat Ukur	41.060.000,00
18	Belanja Modal alat Kedokteran	366.325.000,00
19	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.921.075.940,00
	Jumlah	19.350.415.582,00

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp43.270.248.639,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp40.705.968.967,00 atau 94,07%, dan sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp2.564.279.672,00 atau 5,93%.

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp44.476.563.577,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai sebesar Rp41.084.476.271,00 atau 92,37%, dan sisa anggaran yang tidak dapat diserap adalah sebesar Rp3.392.087.306,00 atau 7,63%.

Rincian belanja jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan	31.637.011.515,00
2.	Belanja Modal Jembatan	331.515.000,00
3.	Belanja Modal Jaringan Air	6.203.538.756,00
4.	Belanja Modal Penerangan Jalan	1.269.779.000,00
5.	Belanja Modal Instalasi Listrik Telepon	1.642.632.000,00
	Total	41.084.476.271,00

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp2.426.873.800,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai sebesar Rp2.499.163.600,00 atau 102,98%, dengan demikian anggaran yang terealisasi melampaui target sebesar Rp72.289.800,00 atau 2,98%.

Rincian belanja Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal Buku / Kepustakaan	2.108.316.000,00
2	Belanja Modal Barang bercorak kesenian	16.437.600,00
3	Belanja Modal Hewan ternak / Tanaman	197.800.000,00
4	Alat Keamanan	176.610.000,00
	Jumlah	2.499.163.600,00

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp9.272.400.000,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 belanja ini terealisasi sebesar Rp8.726.929.750,00 atau 94,12%.

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp(554.733.992,00) bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2011 yang bersaldo negatif sebesar Rp(554.733.992,00). Penggunaan silpa sebesar Rp(554.733.992,00) dikarenakan pada tahun 2011 terjadi Sikpa sebesar Rp(141.234.425,00) dan reklas kas bendahara pengeluaran menjadi aset lainnya sebesar Rp(413.499.567,00).

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp5.250.000.000,00, realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp4.750.000.000,00 atau 90,48%. Seluruh pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan penyertaan modal yang terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyertaan Modal ke BPR Syariah	2.250.000.000,00
2	PDAM	2.000.000.000,00
3	Bank Maluku	500.000.000,00
	Jumlah	4.750.000.000,00

5.1.4 Aset

5.1.4.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

- Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
- Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
- Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
- Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

1. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp18.629.306,00 dan sebesar Rp3.893.299.280,00. sedangkan saldo di Kas Daerah menurut Rekening Bank BUD adalah sebesar Rp275.680.149,00 sebagaimana dalam rincian dibawah ini:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	- BPD Maluku Rek 0601022001	180.763.451,00
2	- BPD Maluku Rek 0601002014	
3	- BNI Rek 0086130053	94.916.698,00
	Jumlah	275.680.149,00

Saldo Rekening Bank sebesar Rp275.680.149,00 sedangkan saldo BKU BUD sebesar Rp18.629.306,00 terdapat selisih sebesar Rp257.050.843,00 dikarenakan ada beberapa SP2D Tahun 2012 yang pada akhir tahun tidak sempat dicairkan dan SP2D tersebut sudah cairkan pada Tahun 2013. Rincian Daftar SP2D yang tidak sempat cair di 2012 dapat di lihat pada Lampiran I.

2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp299.016.797,00 dan sebesar Rp803.072.742,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan hasil konsolidasi dari seluruh saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dari 40 SKPD sebagaimana dijabarkan pada tabel dibawah ini:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	56.397.222,00
2	Sanggar Kegiatan Belajar	9.362.684,00
3	Dinas Kesehatan	5.500.057,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	1.216.453,00
5	Kantor Pemadam	957.429,00
6	Dinas Tata Kota	1.376.298,00
7	Bappeda	1.684.065,00
8	Dinas Perhubungan	6.882.268,00
9	Dinas Kebersihan	1.311.443,00
10	Lingkungan Hidup	2.787.926,00
11	Dinas Catatan Sipil	1.248.065,00
12	Kantor Pemberdayaan Perempuan	1.917.209,00
13	Kantor Keluarga Berencana	71.367.801,00
14	Dinas Tenaga Kerja	1.050.000,00
15	Dinas Koperasi dan UKM	1.484.923,00
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.063.362,00
17	Dispora	1.001.109,00
18	Satpol PP	37.510.487,00
19	Kesbang Linmas	1.043.018,00
20	Sekretariat Daerah	15.820.940,00
21	Sekretariat DPRD	1.025.000,00
22	DPPKAD	21.487.300,00
23	Inspektorat	1.125.000,00
24	Kec. Ternate Utara	3.536.353,00
25	Kec. Ternate Selatan	1.143.508,00
26	Kec. Pulau Ternate	1.082.683,00
27	Kec. Moti	6.277.577,00
28	Kec. Ternate Tengah	862.109,00
29	Kec. Batang Dua	1.235.000,00
30	Kec. Hiri	19.936.462,00
31	BPBD	1.000.000,00
32	BKD	1.472.400,00
33	Badan Pemberdayaan Masyarakat	1.164.720,00
34	Kantor Arsip	1.239.652,00
35	Dispenda	975.000,00
36	Dinas Pertanian	1.246.281,00
37	BP4K	1.458.254,00
38	Dinas Perikanan dan Kelautan	1.089.800,00
39	Dinas Pasar	1.069.156,00
40	Dinas Perindag	21.631.467,00
JUMLAH		311.040.481,00

Bank Pembangunan Maluku yang merupakan tempat menyimpan Kas Bendahara Pengeluaran SKPD mensyaratkan saldo minimal yang harus ada di rekening Bendahara Pengeluaran SKPD adalah Rp1.000.000,00. Sehingga pada akhir tahun dipastikan tidak semua sisa Kas di Bendahara Pengeluaran bisa disetor ke Kas Daerah.

3. Piutang Pajak

Piutang Pajak per 31 Desember 2012 sebesar Rp3.297.382.225,00 dan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.537.461.915,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2012 (Rp)	Per 31 Desember 2011 (Rp)
1	Pajak Hotel	-	97.412.615,00
2	Pajak Restoran	92.268.044,00	102.268.044,00
3	Pajak Reklame	-	3.292.500,00
4	Pajak Penerangan Jalan	1.241.684.465,00	2.371.059.040,00
5	Pajak Galian Gol C	1.963.429.716,00	1.963.429.716,00
	Jumlah	3.297.382.225,00	4.537.461.915,00

Piutang pajak per 31 Desember 2011 tersebut merupakan saldo piutang pajak per 31 Desember 2010 yang masih belum tertagih sampai dengan akhir tahun 2011. Tidak ada penambahan piutang ditahun 2011 karena seluruh Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit tahun 2011 telah dilunasi oleh wajib pajak.

4. Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp937.216.883,00 dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Per 31 Desember 2012 (Rp)	Per 31 Desember 2011 (Rp)
BP-PBB	-	-
PPh-Pasal 21	-	357.559.890,00
Dana Transfer Provinsi	-	755.791.865,00
Jumlah	-	937.216.883,00

Piutang PPh Pasal 21 sesuai Peraturan menteri Keuangan RI No.157/PMK.07/2012 tentang "Alokasi kurang bayar dan lebih bayar Dana bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010". Dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Ternate mempunyai kelebihan bayar Sebesar Rp5.761.964.623, dan akan di kompensasi di pembayaran tahun 2013, oleh karena itu Piutang pph 21 sebesar Rp357.559.890 merupakan kesalahan perhitungan dan harus di dikeluarkan dari Catatan Piutang Pemerintah Kota Ternate.

Untuk Piutang Dana Transfer Provinsi di Tahun 2012 seluruhnya telah di lunasi sehingga saldo Piutang Dana Transfer per 31 Desember 2012 adalah nihil.

5. Piutang Lain-Lain/ Lainnya

Piutang Lain-lain/ Lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp948.953.380,00 merupakan piutang DBH Propinsi yang terdiri dari :

- DBH PKB triwulan III Th 2012 Rp 581.199.112,00
- DBH BBNKB triwulan III Th 2012 Rp 367.754.268,00

Pencatatan piutang ini didasarkan pada surat Kepala DPPKAD Provinsi Maluku Utara no 973/228/2012 tanggal 14 Desember 2012.

6. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp2.241.476.721,00 dan Rp1.415.411.169,00. Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai persediaan ini merupakan akumulasi jumlah persediaan yang tercatat pada Neraca SKPD dengan rincian nilai sbb :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kec. Ternate Tengah	87.200,00
2	Dinas Kesehatan	2.013.998.831,00
3	Kantor Satpol PP	100.000,00
4	Dinas Tata Kota & Pertamanan	13.725.000,00
5	Bappeda	282.800,00
6	BLH	115.000,00
7	Dinas Capil	28.855.490,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan sosial	48.000,00
9	Kantor Kesbang Pol	100.000,00
10	DPKAD	2.584.000,00
11	Inspektorat	874.900,00
12	Kecamatan Hiri	159.500,00
13	BP4K	93.000,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	92.000,00
15	Dinas Pendapatan	179.945.500,00
16	Dinas Pasar	250.500,00
17	Dinas Perindag	165.000,00
	Jumlah	2.241.476.682,00

5.1.4.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp21.957.284.151,00 dan Rp15.418.944.463,00 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)
Investasi Non Permanen	1.057.002.450,00	1.202.576.200,00
Investasi Permanen	20.900.281.701,00	14.216.368.263,00
Jumlah	21.957.284.151,00	15.418.944.463,00

1. Investasi Nonpermanen – Dana Bergulir

Investasi Non Permanen (Dana bergulir) adalah dana yang disalurkan pemerintah dalam rangka penguatan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah. Dana tersebut disalurkan oleh Pemerintah Kota Ternate melalui anggaran pengeluaran pembiayaan. Saldo awal per 31 Desember 2011 Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) adalah sebesar Rp1.202.576.200,00 sedangkan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.057.002.450,00. Saldo tersebut diperoleh dari proses pencairan pengeluaran pembiayaan selama tahun 2002 sampai dengan 2010 sebesar Rp3.106.000.000,00 dikurangi dengan dana bergulir diragukan tertagih sebesar Rp2.048.997.550,00 rincian sebagai berikut.

Tahun	Realisasi (Rp)
2002	435.900.000,00
2003	727.500.000,00
2004	487.600.000,00
2005	365.000.000,00
2006	400.000.000,00
2007	-
2008	300.000.000,00
2009	390.000.000,00
2010	-
2011	-
Jumlah	3.106.000.000,00

Sejak tahun 2010 pemerintah belum menambah investasinya lagi. Dana Bergulir ini seluruhnya diserahkan kepada pengelola dana bergulir. Rincian dana berdasarkan pengelola dana bergulir adalah sebagai berikut:

Pengelola Dan Bergulir	Nilai (Rp)
BRI	435.900.000,00
KSU Makugawene	2.470.100.000,00
ISAP	20.000.000,00
BKCSK/PKK	150.000.000,00
LEPP-M3	30.000.000,00
Jumlah	3.106.000.000,00

Pemerintah Kota Ternate telah mencatat saldo Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) pada Laporan 2012 ini pada nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net reliazable value*) berdasarkan catatan pengelola dana bergulir.

Sebagaimana dinyatakan dalam Buletin Teknis SAP Nomor 7 tentang akuntansi dana bergulir nilai bersih yang dapat direalisasikan diperoleh dari harga perolehan dikurangi Dana Bergulir Diragukan Tertagih dan ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Masih dalam Buletin Teknis tersebut dinyatakan Dana Bergulir Diragukan Tertagih nilainya dapat kita peroleh melalui penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*).

Untuk menentukan jatuh tempo dana bergulir yang tidak tertagih Pemerintah Kota Ternate mengacu pada Laporan Perkembangan Dana Bergulir dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang disampaikan melalui surat Nomor 518/229/KUKM-KT/X/2011. Dalam laporan tersebut dinyatakan penentuan jatuh tempo piutang berpedoman kepada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No 14/Per/M.UKM/II/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No 20/Per/M.UKM/II/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang menyatakan beberapa kategori piutang sebagai berikut:

1. Piutang Macet yaitu pinjaman yang telah jatuh tempo lebih dari satu bulan dari waktu jatuh tempo dan belum dilunasi, serta tidak memiliki ikatan jaminan.
2. Piutang Diragukan yaitu pinjaman yang telah jatuh tempo lebih dari satu bulan dari waktu jatuh tempo dan belum dilunasi, tetapi memiliki ikatan jaminan.
3. Piutang Kurang Lancar, yaitu pinjaman belum jatuh tempo, menunggak angsuran pinjaman selama 3 bulan.
4. Piutang lancar yaitu pinjaman belum jatuh tempo dan lancar dalam pembayaran angsurannya.

Kategori piutang sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri tersebut digunakan oleh Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Koperasi dan UKM untuk menentukan penyelesaian piutang yang didanai melalui dana bergulir ini. Berdasarkan kategori tersebut dapat dilaporkan kondisi piutang pada masing-masing pengelola dana bergulir sebagai berikut:

Pengelola Dana Bergulir	Nilai (Rp)	Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
BRI	435.900.000,00	-	-	238.500.000,00	152.000.000,00
KSU Makugawene	2.470.100.000,00	262.574.000,00	122.033.000,00	669.887.000,00	1.054.690.800,00
ISAP	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00
BKCSK/PKK	150.000.000,00	100.000.000,00	-	-	50.000.000,00
LEPP-M3	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00
Jumlah	3.106.000.000,00	362.574.000,00	122.033.000,00	908.387.000,00	1.306.690.800,00

Klasifikasi diatas maka dilakukan perhitungan dana Berdasarkan bergulir diragukan tidak tertagih sebesar Rp2.048.997.550,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Alokasi Tidak Tertagih	Nilai Piutang (Rp)	Dana Bergulir Diragukan Tidak Tertagih (Rp)
1	Piutang Kurang Lancar	50%	122.033.000,00	61.016.500,00
2	Piutang Diragukan	75%	908.387.000,00	681.290.250,00
3	Piutang Macet	100%	1.306.690.800,00	1.306.690.800,00
				2.048.997.550,00

Berdasarkan keterangan tersebut diatas maka saldo Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2012 adalah:

Uraian	Nilai (Rp)
Investasi Dana Bergulir	3.106.000.000
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(2.048.997.550)
Nilai Realisasi Bersih	1.057.002.450

2. Investasi Permanen

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah. Pada pembentukan perusahaan daerah pemerintah menyetorkan modal tertentu dan hal tersebut dinyatakan dalam akte pendirian perusahaan. Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam perusahaan.

Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari Peraturan Daerah, akte pendirian perusahaan beserta perubahannya, dan bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah. Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada pada laporan keuangan perusahaan bersangkutan yang telah diaudit dikalikan dengan persentase kepemilikan, namun perusahaan-perusahaan yang kepemilikan Pemerintah Kota Ternate mencapai 51% keatas sampai tahun 2012. ini hanya bisa memberikan laporan keuangan yang belum diaudit.

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp20.900.281.701,00 dan Rp14.216.368.263,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2012 (Rp)	Per 31 Desember 2011 (Rp)
1	PT Bank BPD Maluku	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00
2	PD Citra Gamalama	1.445.206.193,00	1.312.396.722,00
3	PDAM	14.263.921.455,35	9.103.971.541,10
4	BPR Syariah	2.691.154.052,62	1.800.000.000,00
	Jumlah	20.900.281.701,00	14.216.368.263,10

PT Bank BPD Maluku

Investasi berupa penyertaan Modal kepada PT Bank Maluku terdiri atas 400 lembar saham PT Bank Maluku (No. A BM. 0016501 s.d 0016900) dengan rincian penyertaan modal sebagai berikut:

No	Penyertaan Modal PT BPDM	Nilai (Rp)
1	Sampai dengan 2005	500.000.000,00
2	Penambahan Tahun 2006	500.000.000,00
3	Penambahan Tahun 2007	500.000.000,00
4	Penambahan Tahun 2009	500.000.000,00
5	Penambahan Tahun 2012	500.000.000,00
	Jumlah	2.500.000.000,00

Berdasarkan penyertaan modal tersebut kepemilikan Pemerintah Kota Ternate pada PT Bank Maluku kurang dari 20% dan Pemerintah Kota Ternate tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Mengacu kepada Peraturan Walikota Ternate tentang Kebijakan Akuntansi kepemilikan kurang dari 20% harus dicatat menggunakan metode biaya dimana nilai investasi dicatat sebesar nilai perolehan. Sehingga Nilai Investasi pada PT Bank Maluku adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 yaitu sebesar nilai perolehannya.

PD Citra Gamalama

Kepemilikan Pemerintah Kota Ternate terhadap PD Citra Gamalama adalah sebesar 100% dimana nilai penyertaan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Ternate sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar Rp1.947.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Penyertaan Modal PD Citra Gamalama	Nilai (Rp)
1	Sampai dengan 2005	750.000.000,00
2	Penambahan Tahun 2006	250.000.000,00
3	Penambahan Tahun 2008	500.000.000,00
4	Penambahan Tahun 2009	150.000.000,00
5	Penambahan Tahun 2011	297.000.000,00
6	Penerimaan Hibah	93.000.000,00
7	Kerugian s/d 2012	(595.393.807,00)
	Jumlah	1.445.206.193,00

Sesuai dengan Peraturan Walikota Ternate tentang Kebijakan Akuntansi kepemilikan lebih dari 50% harus menggunakan metode ekuitas dalam penilaian investasi. Dengan menggunakan metode ekuitas investasi PD Citra Gamalama dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kota Ternate.

Pencatatan penyertaan modal PD Citra Gamalama sebesar Rp1.445.206.193,00

PDAM

Persentase Kepemilikan Pemerintah Kota Ternate terhadap PDAM adalah sebesar 89,32% angka ini didapat dari Penyertaan Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp22.157.691.254,00 (Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp20.983.801.100,00 ditambah saldo awal pada saat pengalihan sebesar Rp1.173.890.154,00) dibagi dengan total penyertaan modal pemerintah sebesar Rp24.807.386.454,00 jumlah penyertaan modal tersebut didapat dari Neraca PDAM Per 31 Desember 2012 yang belum diaudit.

Seperti yang sudah disampaikan diatas kepemilikan diatas 50% harus menggunakan metode ekuitas dalam penilaian investasi. Dengan menggunakan metode ekuitas investasi PDAM dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kota Ternate. Berdasarkan hal tersebut maka nilai Investasi Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2012 adalah Rp14.263.921.455,35 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kekayaan Pemda Yang dipisahkan	1.173.890.154,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah	23.535.745.100,00
3	Modal Hibah	97.751.200,00
3	Jumlah Kepemilikan	24.807.386.454,00
	Penyertaan Modal Kota Ternate	20.983.801.100,00
	Modal Awal Pada Saat Kepemilikan	1.173.890.154,00
	Total Penyertaan Modal Kota Ternate	22.157.691.254,00
4	Persentase kepemilikan	89,32%
5	Saldo Rugi Tahun Lalu	(12.453.492.241,00)
6	Bagian Pemerintah Kota Ternate dari Saldo Rugi Tahun lalu (4x5)	(11.123.325.571,67)
7	Laba Tahun Berjalan	3.615.757.491,00
8	Bagian Pemerintah Kota Ternate dari Laba Tahun Berjalan (4x7)	3.229.555.772,97
9	Nilai Investasi Pemerintah Kota Ternate pada PDAM (3+6+8)	14.263.921.455,30

Sumber: Neraca PDAM Per 31 Desember 2012 *Unaudited*

BPR Syariah

Pada tahun 2012 ini menanamkan modal kepada BPR Syariah melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.050.000.000,00, dengan rincian SP2D sebagai berikut:

Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
11-Mar-11	01044/2011	500.000.000,00
1-Jul-11	03517/2011	100.000.000,00
6-Jul-11	03624/2011	32.000.000,00
13-Oct-11	09038/2011	68.000.000,00
21-Nov-11	09992/2011	200.000.000,00
9-Dec-11	10636/2011	900.000.000,00
18-Jan-12	00097/SP2D	1.035.000.000,00
14-Peb-12	00401/SP2D	150.000.000,00
03-Apr-12	01606/SP2D	65.000.000,00
11-Mei-12	02167/SP2D	1.000.000.000,00
	Jumlah	4.050.000.000,00

BPR Syariah didirikan berdasarkan akta notaris nomor 48 tanggal 27 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Tatiek Nurdjanti, S.H. Dalam

akta tersebut dinyatakan nama lengkap perusahaan ini adalah PT Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Bahari Berkesan atau disingkat PT BPRS Bahari Berkesan. kepemilikan Pemerintah Kota Ternate atas perusahaan ini diatas 50% sehingga harus mencatat dengan metode ekuitas. Tetapi perusahaan milik daerah ini baru akan beroperasi di tahun 2012 BPRS mengalami kerugian sebesar Rp349.921.309,00 sehingga nilai investasi di BPRS sisa, sesuai Neraca per 31 Desember 2012 sebesar Rp2.700.124.566,13, prosentase kepemilikan Pemkot Ternate 99,67% sehingga nilai Penyertaan modal pemkot sebesar Rp2.391.154.052,62 (Rp2.700.124.566,13 x 99,67%)

5.1.4.3 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp1.264.933.900.381,00 dan Rp1.528.285.969.696,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2012 (Rp)	Per 31 Desember 2011 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Tanah	Rp 228.767.057.041,00	Rp 212.443.105.462,00	Rp 16.323.951.579,00
2	Peralatan dan Mesin	Rp 100.290.716.639,00	Rp 121.362.341.989,00	(Rp21.071.625.350,00)
3	Gedung dan Bangunan	Rp 436.983.895.189,00	Rp 704.692.234.441,00	(Rp267.708.339.252,00)
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 418.504.231.276,00	Rp 442.835.824.558,00	(Rp24.331.593.282,00)
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 11.545.613.203,00	Rp 11.005.162.016,00	Rp540.451.187,00
6	Konstruksi dalam Penge	Rp 68.842.387.033,00	Rp 35.947.301.230,00	32.895.085.803,00

Kenaikan atau penurunan aset tetap merupakan mutasi bersih dari aset tetap selama 2012. Kenaikan aset disebabkan oleh belanja modal di tahun 2012 atau karena hasil dari penilaian ulang atas aset tetap tahun 2012. Penurunan aset tetap karena adanya aset yang sudah tidak terpakai dan sudah keluar SK penghapusannya dan juga karena penilaian ulang atas aset tetap tahun 2011 yang pengaruhnya mengurangi nilai aset tersebut.

Dalam saldo aset tetap tersebut termasuk didalamnya selisih antara mutasi aset dengan realisasi belanja modal sebesar Rp317.274.726.455,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Belanja Modal 2012		Rp110.419.657.140,00
b) Aset Tetap 2012	Rp1.264.933.900.381,00	
c) Aset Tetap 2011	<u>Rp1.528.285.969.696,00</u>	
		(Rp263.352.069.315,00)
	Selisih	(Rp373.771.726.455,00)

Hal tersebut terjadi karena adanya penilaian kembali KJPP Tahun 2012.

Untuk meyakinkan kepemilikan Nilai Aset pemerintah Kota Ternate, seperti BPKB Tahun 2011 yang ada baru berjumlah 417 Buah, setelah

dilakukan tindak lanjut atas temuan LHP Bidang Aset mengkoordinir pengurus barang untuk mengumpulkan BPKB yang ada di SKPD dan ditemukan sebanyak 79 Buah sehingga jumlah BPKB sampai dengan akhir Tahun 2012 telah mencapai 496 Buah.

Untuk Sertifikat Tanah di Tahun 2011 hanya terdapat 49 buah, setelah tindak lanjut atas temuan LHP oleh Bidang aset, sehingga di Tahun 2012 sertifikat bertambah sebanyak 4 buah ditambah dengan pengurusan baru dari Pertanahan sebanyak 18 buah, sehingga Total sertifikat tanah yang ada sampai dengan Akhir Tahun 2012 berjumlah 71 Buah.

5.1.4.3.1 Aset Tetap Tanah

Aset tetap tanah merupakan aset tetap tanah kantor. Aset tetap tanah per 31 Desember 2012 sebesar Rp228.767.057.041,00 terdapat didalamnya tanah yang tidak didukung bukti kepemilikan sebesar Rp183.081.144.511,00 dan dua bidang tanah tidak diketahui harga perolehannya.

5.1.4.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2012 sebesar Rp100.290.716.639,00 terdiri dari:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Alat Berat	11.520.750.000,00
2	Alat Angkut Darat Bermotor	34.598.131.858,00
3	Alat angkut Darat tidak Bermotor	82.080.273,00
4	Alat Angkut Air Bermotor	2.018.404.000,00
5	Alat Angkut Air Tidak Bermotor	1.055.146.756,00
6	Alat angkut Udara	-
7	Alat Bengkel	2.584.333.219,00
8	Alat Pengolahan Pertanian	338.435.000,00
9	Peralatan Kantor	5.226.586.561,00
10	Perlengkapan Kantor	4.296.921.741,00
11	Komputer	11.413.338.468,00
12	Mebulair	6.370.871.779,00
13	Alat Dapur	307.546.087,00
14	Penghias Rumah Tangga	1.895.342.568,00
15	Alat Studio	3.029.513.794,00
16	Alat Komunikasi	931.604.000,00
17	Alat Ukur	121.640.800,00
18	Alat Kedokteran	5.695.396.843,00
19	Alat Laboratorium	8.701.108.892,00
20	Alat Keamanan	103.564.000,00
	Jumlah	100.290.716.639,00

Atas aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp100.290.716.639,00 terdapat didalamnya kendaraan yang tidak didukung bukti kepemilikan sebesar Rp24.877.896.142,50 dan sebanyak 12 kendaraan tidak diketahui harga perolehannya.

5.1.4.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2012 sebesar Rp436.983.895.189,00 terdiri dari:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Gedung Kantor	366.742.407.092,00
2	Rumah Jabatan	4.919.059.000,00
3	Rumah Dinas	13.366.500.650,00
4	Bangunan Gudang	1.235.174.000,00
5	Bangunan Bersejarah	980.726.000,00
6	Monumen	12.933.000,00
7	Tugu Peringatan	80.691.000,00
8	Bangunan lainnya	49.646.404.44,00
	Jumlah	436.983.895.189,00

5.1.4.3.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2012 sebesar Rp418.504.231.276,00 terdiri dari:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Jalan	328.757.417.941,00
2	Jembatan	16.951.475.993,00
3	Jaringan Air	50.955.915.745,00
4	Penerangan Jalan,Taman,Hutan Kota	18.350.806.915,00
5	Instalasi Listrik.telpon	3.448.614.682,00
	Jumlah	418.504.231.276,00

5.1.4.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp11.545.613.203,00 terdiri dari:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Buku & Kepustakaan	10.841.729.614,00
2	Barang Kesenian	669.669.589,00
3	Hewan Ternak	34.214.000,00
	Jumlah	11.545.613.203,00

5.1.4.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp68.842.387.033,00 terdiri dari:

NO	DESKRIPSI	NILAI (Rp.)
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Pasar tradisional Thp I	997,500,000
	Pasar tradisional Thp II	259,000,000
	Pasar tradisional Thp III	984,770,000
	Sub Total	2,241,270,000
2	Dinas Pendidikan Nasional	
	Pembangunan kantor UPTD Diknas Tengah	179,700,000
	Pembangunan kantor UPTD Ternate Pulau (Lanj.)	133,095,000
	Perencanaan teknis pemb. Kantor UPTD Ternate Pulau	6,000,000
	Pengawasan teknis pemb. Kantor UPTD Ternate Pulau	3,600,000
	Kantor Dinas	599,400,000
	Perencanaan dan pengawasan kantor dinas dan UPTD Diknas Tengah	55,500,000
	Sub Total	977,295,000
3	Dinas Pekerjaan Umum	
	Fasilitas Umum/Gelanggang Remaja Tahap I	1,071,360,000
	Perencanaan Fasilitas Umum/Gelanggang Remaja Tahap I	65,140,000
	Pengawasan Fasilitas Umum/Gelanggang Remaja Tahap I	35,200,000
	Fasilitas Umum/Gelanggang Remaja Tahap II	560,000,000
	Fasilitas Umum/Gelanggang Remaja Tahap III	120,000,000
	Survey dan Investigasi Pemb. Jalan Pantai Kota baru Bastiong	97,600,000
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap I	3,567,690,000
	Perencanaan Jalan Pantai Kota Baru Bastiong I	159,840,000
	Pengawasan Jalan Pantai Kota Baru Bastiong I	119,600,000
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap I (DIPD-L)	3,282,710,000
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap II	848,160,000
	Perencanaan Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap II	143,600,000
	Pengawasan Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap II	78,740,000
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap II (DIPD-L)	2,127,840,000
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap III	2,214,550,000
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap III (DIPD-L)	5,545,450,000
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap IV (MY)	240,000,000
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap V (MY)	1,423,910,000
	Jalan Kelurahan Makassar Timur	770,860,000
	Jalan Kelurahan Makassar Timur (DIPD-L)	243,430,000
	Jalan/Penataan Kelurahan Makassar Timur Tahap II	200,000,000
	Pemb. Jalan Kel. Kampung Makassar Timur Kota Ternate	1,333,338,000
	Pengawasan Teknis Pemb. Jalan Kel. Kampung Makassar Timur	37,491,300
	Pembangunan Pasar Rakyat Modern Hygienis	5,296,534,770

NO	DESKRIPSI	NILAI (Rp.)
	Perencanaan Pembangunan Pasar Rakyat Moderen Hygienis	452,390,000
	Pengawasan Pembangunan Pasar Rakyat Moderen Hygienis	106,755,000
	Pemb. Jalan Pantai Tapak I Plus - Tapak III Kota Ternate	4,767,000,000
	Perencanaan Pemb. Jalan Pantai Tapak I Plus - Tapak III Kota Ternate	58,200,000
	Perenc. Teknis Pemb. Jalan Kota Baru - Bastiong	174,240,000
	Jl. Dufa-Dufa Beach	1,714,789,812
	Talud Daulasi / Pengaman Badan Jalan_ Jl. Dufa-Dufa Beach	599,590,000
	Rehab Talud Penahan Ombak Kel. Dufa-dufa_ Jl. Dufa-Dufa Beach (Nyare Madehe)	855,000,000
	Rehabilitasi Talud Penahan Ombak Dufa-dufa (DIPDA-L)_ Jl. Dufa-Dufa Beach (Nyare Madehe)	676,590,000
	Rehab & Rekonstruksi Talud Penahan Ombak Kel.Dufa Dufa_ Jl. Dufa-Dufa Beach (Nyare Madehe)	719,650,000
	Rehab & Kontruksi Talud Penahan Ombak Nyare Madehe_ Jl. Dufa-Dufa Beach (Nyare Madehe)	620,350,000
	Rehab dan Kontruksi Talud Penahan Ombak Kel. Dufa - Dufa (DPAL)_ Jl. Dufa-Dufa Beach (Nyare Madehe)	795,410,000
	Talud dan Timbunan Nyaremadehe Dufa- Dufa_ Jl. Dufa-Dufa Beach (Nyare Madehe)	1,734,240,000
	Pasar Rakyat Moderen Hygienis	2,601,528,180
	Ruko Bagian Selatan	3,585,453,000
	Ruko Bagian Utara	3,585,409,000
	Gedung TASBAQ	248,700,000
	Jalan Pantai Kotabaru-Bastiong (Lanjutan)	2,920,645,780
	Jalan Pantai Tapak I Plus-Tapak III (Lanjutan)	3,879,273,040
	Review Desain Pemb Jalan Pantai Tapak I Plus - Tapak III	74,500,000
	Sub Total	59,752,757,882
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	Pembangunan Museum dan taman budaya daerah	1,656,078,950
5	Kecamatan Batang Dua	
	Reahab & penataan halaman Kantor Camat	362.645.201
	Pembangunan Aula Serba Guna	88.500.000
	Sub Total	451.145.201
6	Sekretariat Daerah	3.527.340.000
	Total	68.842.387.033

5.1.4.4 Aset Lainnya

Akun	Per 31 Des 2012 (Rp)	Per 31 Des 2011 (Rp)
Aset Lainnya	23.150.317.987,00	24.832.672.963,00-

Saldo aset lainnya pada Neraca per 31 Desember 2012 sebesar Rp23.150.317.987,00.

5.1.5 Kewajiban

Akun	Per 31 Desember 2012 (Rp)	Per 31 Desember 2011 (Rp)
Kewajiban	14.905.680.015,00	24.771.604.103,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2012 sebesar Rp14.905.680.015,00 seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sedangkan Kewajiban per 31 Desember 2011 sebesar Rp24.771.604.103,00, yang seluruhnya juga merupakan kewajiban jangka pendek. Penjelasan lebih lanjut Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

5.1.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp14.905.680.015,00 dan Rp24.771.604.103,00, terdiri dari:

No	Uraian	Per 31 Desember 2012 (Rp)	Per 31 Desember 2011 (Rp)
1	Utang PFK	14.743.468.952,00	4.835.722.596,00
2	Utang Belanja		19.935.881.507,00
3	Utang jk Pendek lainnya	162.211.063,00	
	Jumlah	14.905.680.015,00	24.771.604.103,00

Penjelasan lebih lanjut saldo Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Merupakan Utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Akses, Taspen, dan Taperum. Kewajiban Jangka Pendek berupa utang PFK per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp14.743.468.952,00 dan Rp4.835.722.596,00 terdiri dari:

BUD			
1	PFK dari SP2D LS Barang Jasa	7,772,302,039.00	4,828,342,255.00
2	PFK dari SP2D LS Gaji dan Tunjangan	6,939,453,171.00	174.00
	Jumlah PFK BUD	14,711,755,210.00	4,828,342,429.00
SKPD			
1	Dinas Pendidikan		(2,650,000.00)
2	Dinas Pariwisata	454,545.00	454,545.00
3	DPPKAD	19,636,500.00	4,190,678.00
4	Dinas Perdagangan	9,478,978.00	
5	Kecamatan Ternate Utara	1,973,273.00	5,296,498.00
6	Kecamatan Pulau Ternate		(82,000.00)
7	Dinas Perhubungan & Kominfo	170,446.00	170,446.00
	Jumlah PFK SKPD	31,713,742.00	7,380,167.00
	JUMLAH	14,743,468,952.00	4,835,722,596.00

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2012 dari SP2D LS Barang Jasa sebesar Rp14.711.755.210,00 merupakan pemotongan pajak pada SP2D barang dan jasa yang belum disetor ke kantor pajak.

Utang PFK di SKPD sebesar Rp31.713.742,00 merupakan pajak yang dipotong pada saat belanja menggunakan UP/GU/TU yang sampai akhir tahun 2012 belum disetorkan ke kantor pajak.

2. Utang Belanja

Akun	Per 31 Desember 2012 (Rp)	Per 31 Desember 2011 (Rp)
Utang Belanja	-	19.935.881.507,00

Utang Belanja di Tahun 2011 sebesar Rp19.935.881.507,00 merupakan utang kepada penyedia barang dan jasa yang telah menyelesaikan pekerjaannya dan SP2D LS nya sudah diterbitkan di Tahun 2011 tetapi belum bisa dicairkan karena saldo Kas di Kas Daerah tidak mencukupi dan dicairkan di tahun 2012, sedangkan untuk pencatatan belanja atas SP2D tersebut telah dibuatkan SP2D pengganti di Tahun 2012, untuk itu untuk Tahun 2012 Saldo Utang Belanja telah Nihil. Karena telah dibayarkan dengan penerbitan SP2D Baru. Rincian SP2D Tahun 2011, tanggal pencairan dan SP2D pengganti Tahun 2012, dapat dilihat pada Lampiran II.

3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp162.211.063,00 adalah merupakan kewajiban pada dinas Kesehatan terhadap RSUD Chasan Boesoirie, RSUD Harifalm, Apotik Kimia Farma dan Apotik Bahari Berkesan .

5.1.6 Ekuitas Dana

Akun	Per 31 Desember 2012 (Rp)	Per 31 Desember 2011 (Rp)
Ekuitas Dana	1.301.953.304.617,00	1.554.288.500.191,00

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp1.301.953.304.617,00 dan Rp1.554.288.500.191,00.

5.1.6.1 Ekuitas Dana Lancar

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar (Rp8.088.197.902,00) dan (Rp 14.249.086.931,00) terdiri dari:

No	Uraian	Per 31 Desember 2012 (Rp)	Per 31 Desember 2011 (Rp)
1	SILPA	(14.416.677.770,00)	(141.234.426,00)
2	Pendapatan yang Ditangguhkan	2.878.605,00	1.883.852,00
3	Cadangan Piutang	4.246.335.605,00	4.410.733.980,00
4	Cadangan Persediaan	2.241.476.721,00	1.415.581.615,00
5	DYHD Utang Jangka Pendek	(162.211.063,00)	(19.935.881.507,00)
5.1.6.3	Jumlah	(8.088.197.902,00)	(14.248.916.486,00)

5.1.6.4

5.1.6.2 Dana Investasi

Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp1.308.620.952.953,00 dan Rp1.568.537.587.122,10 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2012 (Rp)	Per 31 Desember 2011 (Rp)
1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	21.957.284.151,00	15.418.944.463,10
2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.264.933.900.381,00	1.528.285.969.696,00
3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	23.150.317.987,00	24.832.672.963,00
	Jumlah	1.310.041.502.519,00	1.568.537.587.122,10

5.1.7 Komponen-Komponen Laporan Arus Kas

Fungsi Laporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu Tahun Anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2012.

Arus kas Pemerintah Kota Ternate selama Tahun 2012 mengalami penurunan bersih sebesar Rp(4.366.702.236,00), jumlah ini diperoleh dari selisih lebih arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp101.308.013.362,00 selisih kurang arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp110.419.957.140,00, selisih kurang arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp4.750.000.000,00 dan selisih lebih Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp9.495.241.542,00. Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2012 sebesar Rp18.629.306,00. Di samping itu terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp311.040.481,00, sehingga jumlah keseluruhan Kas adalah sebesar Rp329.669.787,00

Berikut disajikan secara rinci Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2012.

5.1.7.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2012, Pemerintah Kota Ternate jumlah arus kas masuk sebesar Rp574.486.330.945,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp473.178.317.583,00. Sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2012 sebesar Rp101.308.013.362,00 dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

No	Uraian	Per 31 Desember 2012	Per 31 Desember 2011
1	Hasil Pajak Daerah	17.989.070.701,00	15.477.846.926,00
2	Hasil Retribusi Daerah	10.066.416.034,00	10.977.469.958,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	292.560.386,00	263.772.207,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.559.297.713,00	4.599.022.727,00
5	Bagi Hasil Pajak	30.660.387.231,00	50.800.952.114,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2012	Per 31 Desember 2011
6	Bagi Hasil SDA	12.462.757.732,00	-
7	Dana Alokasi Umum	404.588.285.000,00	313.861.356.000,00
8	Dana Alokasi Khusus	43.365.800.000,00	29.521.400.000,00
9	Dana Penyesuaian	37.197.651.680,00	85.416.616.880,00
10	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	10.479.032.628,00	14.102.546.659,00
11	Pendapatan Hibah	2.758.840.000,00	1.932.377.641,89
12	Pendapatan Lainnya	66.231.840,00	128.177.906,00
	Jumlah	574.486.330.945,00	527.081.539.018,89

Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Pegawai	354.473.627.626,00
2	Belanja Hibah	3.007.460.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial	9.000.193.450,00
4	Belanja Bantuan Keuangan	520.739.120,00
5	Belanja Tak Terduga	8.726.929.750,00
6	Belanja Barang dan Jasa	97.411.946.396,00
7	Belanja Bunga	37.421.241,00
	Jumlah	473.178.317.583,00

5.1.7.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2012, Pemerintah Kota Ternate jumlah tidak ada arus kas masuk dari aktivitas investasi aset nonkeuangan. Sedangkan arus kas keluar sebesar Rp110.419.957.140,00. Sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas investasi aset nonkeuangan per 31 Desember 2012 sebesar Rp(110.419.957.140,00) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	Tanah	6.779.932.720,00
2	Peralatan dan Mesin	19.350.415.582,00
3	Gedung dan Bangunan	40.705.968.967,00
4	Jalan, irigasi dan jaringan	41.084.476.271,00
5	Aset tetap lainnya	2.499.163.600,00
	Jumlah	110.419.957.140,00

5.1.7.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Pemerintah Kota Ternate tahun 2012 adalah sebesar Rp(4.750.000.000,00). Jumlah tersebut berasal dari arus kas masuk sebesar Rp0,00 dan arus kas keluar sebesar Rp4.750.000.000,00. Arus kas keluar sebesar Rp4.750.000.000,00 adalah merupakan penyertaan modal kepada BUMD.

5.1.7.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2012, menyajikan jumlah arus kas masuk dari aktivitas non anggaran adalah sebesar Rp65.867.816.624,00. Arus kas masuk ini merupakan kas masuk dari pemotongan pajak dan potongan-potongan lainnya terkait belanja gaji maupun barang dan jasa baik di BUD maupun di SKPD sebesar Rp60.397.938.019,00, pendapatan ditangguhkan yang bersumber dari penerimaan jasa giro tahun 2011 dan selisih pembulatan yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp2.878.605,00, dan penerimaan hutang jangka pendek sebesar Rp5.467.000.000,00.

Arus kas keluar dari aktivitas non anggaran sebesar Rp56.372.575.082,00 merupakan setoran dari pemotongan pajak dan potongan-potongan lainnya terkait belanja gaji maupun belanja barang baik di BUD maupun di SKPD sebesar Rp50.492.075.515,00, reklas kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp413.499.567,00, dan pembayaran hutang jangka pendek sebesar Rp5.467.000.000,00. Reklas kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp413.499.567,00 ini adalah reklasifikasi kas bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan sebesar Rp243.658.266,00, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp105.581.293,00 yang dipindahkan ke Aset Lainnya atas Kas yang dicuri pada Tahun 2011, dan kas bendahara pengeluaran Kantor Camat Ternate Selatan yang menyatu dalam kasus gaji fiktif Tahun 2010 sebesar Rp47.856.008,00 serta yang dicuri pada Tahun 2011 sebesar Rp16.404.000,00.

BAB VI

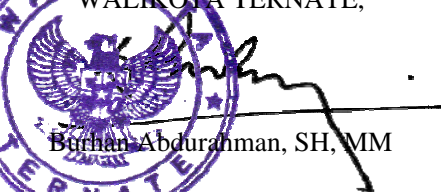
PENUTUP

Pemerintah Kota Ternate memiliki 42 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasi dari 42 SKPD entitas akuntansi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate.

Pemerintah Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2012 juga telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Tahun 2011 berupa perbaikan dalam pelaporan pendapatan, pelaporan nilai investasi, penatausahaan perhitungan PFK, dan beberapa rekomendasi lainnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2012 diharapkan mampu memberikan informasi tentang kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan manajemen, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Kota Ternate.

Demikian Laporan Keuangan Kota Ternate Tahun Anggaran 2012.

WALIKOTA TERNATE,

Burhan Abdurrahman, SH, MM

